

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT BIDANG PEMBANGUNAN

A. Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa

1. Permasalahan

Upaya penegakan hukum di Propinsi DKI Jakarta telah mendapat perhatian, walaupun sudah menunjukkan kemajuan yang berarti. Sementara pengembangan dan perbaikan produk hukum karena perubahan otonomi daerah dan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi, masih terus dilakukan. Kuantitas dan kualitas kejahatan relatif masih tinggi dan terjadi hampir di semua wilayah. Euforia demokrasi pada beberapa aspek telah menjurus pada kebebasan yang tidak terkendali dimana rambu-rambu hukum diabaikan, serta adanya kecenderungan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin rapuh yang berdampak kepada tindakan anarkis oleh sebagian masyarakat. Hal mana menyebabkan gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban di DKI. Kondisi ini menyulitkan posisi Pemerintah Daerah dalam penegakan ketentraman dan ketertiban umum. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum, perwujudan budaya hukum dan penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi sangat penting. Upaya yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan guna menciptakan citra kehidupan yang tertib, disiplin, nyaman dan damai terus dilakukan, melalui langkah-langkah yang efektif dan koordinatif.

2. Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan diatas, arah dan kebijakan pemerintah daerah ditujukan pada penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna mewujudkan kemandirian Jakarta yang kondusif.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta,

maka seluruh Peraturan Daerah yang telah ada harus segera disesuaikan dan disempurnakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat yang kian berkembang. Oleh karenanya, perlu segera dilakukan langkah-langkah inventarisasi dan kodifikasi terhadap Perda-Perda yang diprioritaskan dan sangat mendesak untuk dilakukan revisi serta segera mengajukannya ke DPRD. Kodifikasi Perda-perda yang masih berlaku dalam satu buku seperti model Engelbrecht diperuntukkan bagi Anggota Dewan, level-level Pimpinan Eksekutif dan Muspida agar memudahkan dalam penggunaannya apabila diperlukan.

Melalui penataan kembali seluruh peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada era otonomi daerah, penegakan hukum, peningkatan kepastian hukum, serta mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat dan aparatur daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Karena itu pelaksanaan supremasi hukum perlu dilakukan secara tegas dan konsekuen dengan mengikut sertakan warga masyarakat, lembaga-lembaga hukum serta pakar hukum.

Disamping itu perlu dilakukan penyebarluasan atau sosialisasi produk-produk hukum terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak sampai ketingkat RT/RW.

Program Pembangunan Politik di DKI Jakarta, baik melalui program pemberdayaan infra struktur politik maupun supra struktur politik di lima wilayah kotamadya, diarahkan agar dapat memberikan peningkatan pendewasaan politik, pembinaan kerukunan kehidupan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif di DKI Jakarta. Sebagai dampak krisis multi dimensi yang terjadi Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia hingga saat ini masih sering diwarnai dengan adanya demonstrasi/konflik di bidang politik untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu yang berimplikasi terhadap adanya tindakan yang bersifat destruktif dan anarkis.

Sejalan dengan maraknya isu Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari hak-hak politik, maka diperlukan langkah-langkah untuk mensosialisasikan

pemahaman tentang HAM di kalangan masyarakat dan aparat, terutama terhadap aparat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penegakan hukum.

Selanjutnya penciptaan kondisi kota Jakarta yang tentram, tertib aman dan teratur, serta stabilitas daerah yang mantap dan dinamis sangat diperlukan agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, aktivitas masyarakat, serta mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Oleh karena itu, pelaksanaan penertiban preventif perlu dilakukan secara kontinyu dan konsisten, antara lain terhadap pedagang kaki lima yang berada pada trotoar yang tidak ditetapkan sebagai lokasi pedagang kaki lima oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan terhadap daerah rawan gangguan Kamtibmas, pengawasan dan pemberantasan peredaran Narkoba, pengawasan dan penertiban tempat-tempat hiburan, pemberantasan perjudian dan tempat-tempat prostitusi dan pengawasan penertiban gubuk-gubuk liar pada bantaran sungai.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional di lapangan, aparat tramtib agar melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tegas, disiplin serta selalu berpegang kepada koridor hukum/aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dihindari tindakan/perbuatan-perbuatan yang bersifat brutal, kasar dan pelanggaran HAM yang sering menimbulkan perlawanan dari masyarakat terhadap aparat pelaksana di lapangan. Hal ini sangat penting, agar penegakan hukum tidak berimplikasi terhadap permasalahan baru yang penanganannya akan menjadi lebih rumit.

Untuk mendukung kondisi tersebut, perlu dijalin kerjasama/koordinasi yang lebih terencana dan komprehensif antara Dinas Tramtib dengan Polda Metro Jaya / aparat keamanan lainnya dan masyarakat luas dengan peralatan yang memadai untuk mengamankan wilayah DKI Jakarta.

3. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari arah dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah DKI Jakarta di bidang hukum, ketentraman, ketertiban umum dan kesatuan

bangsa, disusun program-program daerah sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan diatas. Program-program tersebut dikelompokkan kedalam masing-masing fungsi sebagai berikut :

a. Hukum

1). *Program Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) memperkuat kelembagaan bagi proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang mampu menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat Jakarta, (2) melakukan inventarisasi, penyusunan kodifikasi produk hukum, (3) menyusun peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif serta birokrasi yang profesional, bersih, responsif, dan berkeadilan sejalan dengan era otonomi daerah, (4) menyempurnakan peraturan perundang-undangan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, (5) meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum.

2). *Program Peningkatan Kesadaran Hukum.*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah yang telah di-Perda-kan dalam rangka penyadaran hukum bagi semua lapisan dan golongan masyarakat, (2) menyebarluaskan berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan daerah

3). *Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum.*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum, (2) meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, (3) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.

b. Kesatuan Bangsa

1). Program Pemantapan Integrasi Bangsa dan HAM.

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) mengembangkan sistem budaya bermasyarakat yang rukun dan tenteram dengan menghilangkan budaya primordial dan partisan, (2) mengembangkan iklim politik yang kondusif menjelang Pemilu 2004, (3) meningkatkan fungsi RT/RW di setiap kelurahan di wilayah DKI Jakarta, (4) pengembangan demokrasi melalui pendewasaan politik masyarakat dan (5) memasyarakatkan dan menerapkan prinsip kebersamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.

2). Program Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan.

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menginventarisir lembaga kemasyarakatan yang ada, mulai dari tingkat kelurahan, (2) memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar pengurus lembaga kemasyarakatan secara periodik, (3) mendorong terjalinnya komunikasi dan saling tukar informasi antar lembaga kemasyarakatan.

c. Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

1). Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) meningkatkan profesionalisme aparat keamanan dan petugas tramtib agar dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada hukum yang berlaku serta memperhatikan Hak Azasi Manusia (HAM), (2) meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dan masyarakat yang lebih efektif dan terpadu, (3) meningkatkan penanganan masalah narkoba, judi, prostitusi dan penertiban PMKS secara terpadu, dan (4) meningkatkan kualitas upaya-upaya penertiban, antara lain peningkatan pengawasan terhadap daerah rawan kejahatan/ kriminalitas.

2). *Program Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Tramtibmas dan Penanggulangan Bencana.*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangan daerah yang mengatur peranan petugas keamanan dan peranserta masyarakat dalam menangani ketentraman dan ketertiban umum, (2) meningkatkan sarana dan prasarana keamanan lingkungan, dan (3) meningkatkan peranserta masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

3). *Program Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.*

Kegiatan yang akan dilakukan antara lain: (1) meningkatkan profesionalisme petugas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran, (2) mewujudkan terpenuhinya standar minimal peralatan penanggulangan bencana, (3) membentuk sistem dan pusat penanggulangan bencana (*crisis center*), (4) menambah hidran pemadam kebakaran pada daerah padat dan rawan kebakaran, serta pusat perdagangan, (5) meningkatkan armada pemadam kebakaran.

4). *Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Tramtib dan Penanggulangan Bencana.*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) melengkapi peralatan operasional tramtib, (2) memanfaatkan perkembangan teknologi peralatan tramtib guna mengantisipasi timbulnya gangguan tramtib yang lebih canggih.

4. Matriks Indikator Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
HUKUM	1. Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	a) Tersedianya 11 Raperda baru yang sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat b) Terlaksananya penyempurnaan 6 Perda c) Terlaksananya kerja sama Kelembagaan dan Pakar Hukum
	2. Peningkatan Kesadaran Hukum	a) Terlaksananya sosialisasi yang efektif melalui multi media b) Terlaksananya sosialisasi hukum kepada kelompok masyarakat, pelajar dan mahasiswa dan aparat
	3. Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum	a) Tersusunnya mekanisme yang lebih baik dalam pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat b) Terlaksananya pelayanan dan penegakan hukum c) Terlaksananya pelatihan untuk peningkatan profesionalisme bagi aparat penegak hukum
Ketentraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana	1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	a) Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat untuk pencegahan anarkisme massa, tawuran dan pelanggaran HAM antar kelompok masyarakat b) Menurunnya tingkat kriminalitas c) Meningkatnya rasio jumlah petugas kamtibmas terhadap jumlah penduduk
	2. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Trantibmas dan Penanggulangan Bencana	a) Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dalam hal kamtibmas b) Terlaksananya diklat linmas RT/RW sebanyak 1.700 orang
	3. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	a) Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, a.l. minimal mobil pemadam 5 unit, APAR RT/RW 6.600 buah, hydran pemadam kebakaran 100 buah, mobil rescue 1 unit, smart alarm 600 unit. b) Terlaksananya peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat pemadam kebakaran c) Terlaksananya pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran
	4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Trantib dan Penanggulangan Bencana	a) Tersedianya peralatan kamtib dan penanggulangan bencana, a.l : pengadaan alat penjinak bom 2 unit, pengadaan mobil operasional khusus 50 unit b) Terlaksananya antisipasi terhadap gejala gangguan kamtibmas

Kesatuan Bangsa		
	1. Pemantapan Integrasi Bangsa dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya upaya pembinaan kerukunan antar warga dalam masyarakat b) Meningkatnya peran instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga independen dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia c) Terlaksananya koordinasi dalam rangka persiapan Pemilu 2004
	2. Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya koordinasi dalam rangka stabilitas politik dan keamanan yang nyaman dan kondusif b) Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka kesamaan persepsi terhadap hasil-hasil pembangunan

B. Bidang Pemerintahan

1. Permasalahan

Reformasi dan tuntutan masyarakat yang berkembang menghendaki perubahan total pada sikap dan perilaku aparat pemerintahan daerah baik dalam menjalankan fungsi pelayanan publik maupun fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perangkat yang dimiliki Pemerintah DKI Jakarta untuk menjalankan fungsi tersebut dipandang belum optimal.

Pertama, kelembagaan dan ketatalaksanaan belum bekerja secara efisien dan efektif, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas. Selain itu struktur eselonisasi pada jajaran Pemda DKI Jakarta belum secara optimal melaksanakan fungsi pengawasan melekat kepada bawahannya, sehingga kurang optimalnya setiap pegawai dalam melaksanakan tupoksinya.

Kedua, kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah masih belum memadai dan hal ini tentunya menyangkut pula masalah disiplin, etos kerja, motivasi, tanggung jawab, bahkan penerapan "*reward and punishment*". Di samping itu sistem pengujian "*fit and proper, intelligence quotient, dan emotional quotient*" perlu lebih ditingkatkan dalam pengisian jabatan di birokrasi. Upaya memangkas jalur birokrasi masih perlu dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat agar berlangsung efisien, efektif, murah dan cepat.

Ketiga, prasarana dan sarana yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Disamping itu, pemeliharaan dan rasa memiliki prasarana dan sarana pada sebagian aparatur masih kurang. Dengan demikian secara keseluruhan diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas aparatur Pemerintah Daerah dan perangkatnya untuk mampu memenuhi: (1) penyelenggaraan administrasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, (2) fungsi pelayanan publik yang optimal, serta (3) penyediaan prasarana dan sarana umum yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam hal kegiatan penerangan, komunikasi dan media massa agar lebih diarahkan pada penyebarluasan informasi yang lebih merata dan berkualitas/berbobot sehingga kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berdampak positif terhadap partisipasi warga masyarakat dalam menunjang pembangunan DKI Jakarta.

Untuk menunjang berbagai kegiatan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta diperlukan anggaran yang memadai. Selama ini primadona sumber PAD adalah dari pemasukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di lain pihak, peluang penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah masih terbuka, dan dapat dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutannya serta diimbangi oleh peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak.

Perhatian juga perlu diberikan pada pengelolaan aset-aset daerah terutama tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu perlu diupayakan penjagaan dan pengawasan secara kontinu, termasuk upaya pengamanan serta penertiban secara tegas sejak awal, sehingga aset daerah tidak dikuasai oleh pihak-pihak lain yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

2. Arah Kebijakan

Dalam upaya merealisasikan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berorientasi pada kepentingan publik, maka arah dan kebijakan pemerintahan daerah harus mampu melakukan perubahan mendasar

secara internal dengan berorientasi pada perubahan dan perkembangan lingkungan masyarakatnya. Untuk itu perlu adanya parameter/standarisasi yang menjadi tolok ukur terhadap kinerja aparatur Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Pola pelayanan kepada masyarakat yang telah ada selama ini perlu lebih ditingkatkan lagi.

Terhadap alokasi anggaran pada Belanja Publik, hendaknya dilakukan berdasarkan azas skala prioritas dengan penuh kecermatan, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta mempunyai nilai sentuhan sosial yang bermanfaat besar bagi masyarakat.

Adapun arah dan kebijakan bagi bidang pemerintahan adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel. Selain itu adalah meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka peningkatan kemandirian dan kinerja pemerintah daerah.

3. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan

Program-program pembangunan DKI Jakarta yang disusun menurut fungsinya, adalah sebagai berikut :

a. Pemerintahan Umum

1). Program Pengembangan Otonomi Daerah

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) meningkatkan operasional legislatif (kelembagaan, sarana dan prasarana), (2) meningkatkan koordinasi antara legislatif dan eksekutif dan (3) meningkatkan dan memperkuat kelembagaan daerah.

2). Program Pengembangan Pemerintahan Tingkat Propinsi

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) merumuskan kebijakan daerah tingkat propinsi, (2) meningkatkan administrasi sekretariat daerah tingkat propinsi.

3). *Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Pusat*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) merumuskan kebijakan dan menata administrasi Wilayah Jakarta Pusat, (2) meningkatkan tertib administrasi Wilayah Jakarta Pusat, dan (3) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan tingkat kelurahan dan kecamatan Wilayah Jakarta Pusat.

4). *Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Utara*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) merumuskan kebijakan dan menata administrasi Wilayah Jakarta Utara, (2) meningkatkan tertib administrasi Wilayah Jakarta Utara, dan (3) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan tingkat kelurahan dan kecamatan Wilayah Jakarta Utara.

5). *Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Barat*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) merumuskan kebijakan dan menata administrasi Wilayah Jakarta Barat, (2) meningkatkan tertib administrasi Wilayah Jakarta Barat, dan (3) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan tingkat kelurahan dan kecamatan Wilayah Jakarta Barat.

6). *Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Selatan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) merumuskan kebijakan dan menata administrasi Wilayah Jakarta Selatan, (2) meningkatkan tertib administrasi Wilayah Jakarta Selatan, dan (3) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan tingkat kelurahan dan kecamatan Wilayah Jakarta Selatan.

7). *Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Timur*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) merumuskan kebijakan dan menata administrasi Wilayah Jakarta Timur, (2) meningkatkan tertib administrasi Wilayah Jakarta Timur, dan (3) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan tingkat kelurahan dan kecamatan Wilayah Jakarta Timur.

8). *Program Pengembangan Pemerintahan Kepulauan Seribu*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) merumuskan kebijakan dan menata administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu, (2) meningkatkan tertib

administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu, dan (3) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan tingkat kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Seribu.

9). *Program Penataan Administrasi Pertanahan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) meningkatkan tertib administrasi pertanahan, (2) meningkatkan sarana peta dasar, (3) melakukan sertifikasi tanah aset daerah, serta (4) meningkatkan pelayanan persertifikatan tanah masyarakat.

b. Aparatur

1). *Program Pengembangan SDM Aparatur*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) meningkatkan kualitas SDM aparatur dengan perencanaan yang komprehensif, (2) meningkatkan kesejahteraan pegawai, (3) menerapkan prinsip *reward and punishment* secara konsekuen, (4) mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai, dan (5) mengembangkan sistem pembinaan pegawai yang obyektif dan transparan.

2). *Program Peningkatan Administrasi Kepegawaian*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menyusun dan menertibkan administrasi kepegawaian agar lebih berdaya guna, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan (2) menyusun sistem data base kepegawaian yang meliputi seluruh karakteristik pegawai, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kotamadya dan propinsi.

3). *Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menyempurnakan sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai sesuai dengan kebutuhan kerja, (2) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai moral dan etika bagi aparatur pemerintah, (3) meningkatkan pendidikan bagi pegawai yang potensial, dan (4) meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan diklat.

4). *Program Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mengevaluasi dan pemantapan struktur organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, (2) menyempurnakan struktur jabatan bagi aparatur pemerintah daerah, serta (3) mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara pemerintahan di DKI Jakarta.

c. Perencanaan dan Pengawasan

1). *Program Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Rencana*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menyusun perencanaan daerah yang mampu menampung kebutuhan masyarakat, (2) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya, serta (3) meningkatkan pengkajian dan analisis perencanaan yang lebih akurat untuk dapat meningkatkan rasio implementasi perencanaan daerah.

2). *Program Penelitian dan Pengembangan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menyusun sistem pendokumentasian hasil penelitian dan pengembangan yang lebih baik untuk memudahkan pencarian referensi dan mengurangi duplikasi penelitian dan pengembangan, (2) mengkaji, mengembangkan, merumuskan, menyusun, melakukan evaluasi, mengkoordinasikan penelitian bidang kesejahteraan masyarakat, perekonomian, tata praja dan aparatur, serta sarana prasarana kota dan lingkungan hidup (3) mempersiapkan dan atau mengadakan kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya (4) menyusun rencana umum pembangunan tahunan, lima tahunan dan menyusun dokumen perencanaan lainnya serta mengolah dan mengembangkan data/ informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

3). *Program Peningkatan Pengawasan Fungsional*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) meningkatkan SDM aparatur pengawas dalam pelaksanaan tugas, (2) menyediakan media *untuk*

menampung aspirasi, pengaduan, dan laporan masyarakat terhadap perilaku dan kinerja aparatur daerah yang diduga terlibat KKN dan atau penyalahgunaan wewenang, (3) mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif dan transparan, (4) meningkatkan kualitas informasi sistem pengawan, dan (5) menegakkan etika dan moral di lingkungan aparat audit internal pemerintah daerah dan menindaklanjuti hasil pengawasan internal secara transparan.

4). *Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menyusun rumusan tentang pengembangan kemitraan dan kerjasama antar kota dan daerah dalam dan luar negeri dan (2) melakukan studi banding tentang pengalaman pembangunan dan pengelolaan kota terutama pada kota-kota yang telah maju.

d. Keuangan Daerah

1). *Program Peningkatan Perbendaharaan Daerah*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) meningkatkan kualitas penyajian data penerimaan dan pengeluaran daerah, (2) mengembangkan dan menata kembali sistem administrasi kas daerah agar lebih transparan dan efektif, serta (3) melakukan komputersasi dalam pengelolaan kas daerah.

2). *Program Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) membina dan mengembangkan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi, (2) memberikan pelatihan keterampilan kepada para pengelola keuangan.

3). *Program Peningkatan Penerimaan Daerah*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) melakukan evaluasi terhadap setiap objek pajak dari sisi target dan realisasinya, proses pemungutannya maupun peluangnya ke depan, (2) membuat perencanaan dan perkiraan target

penerimaan pajak dan retribusi, (3) mengembangkan dan menata sistem penerimaan daerah, (4) memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media tentang pajak daerah, serta (5) memberikan pembinaan dan pelatihan pada petugas pajak dan petugas retribusi.

4). *Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah*

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: (1) mengumpulkan data dan meneliti aset maupun barang milik pemerintah daerah, (2) mengidentifikasi barang-barang pemerintah daerah yang sudah tidak digunakan lagi, (3) menyusun Perda mengenai pencatatan, pendayagunaan dan pengamanan aset Pemerintah Daerah, (4) membuat tanda kepemilikan aset pemerintah daerah dari aspek legal terutama kepemilikan lahan, dan (5) menata sistem dan mekanisme pelaksanaan inventarisasi aset-aset.

e. Sistem Informasi

1). *Program Pengembangan Statistik Daerah*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan data sosial-ekonomi untuk memenuhi kebutuhan umum melalui kegiatan penelitian, survei ataupun sensus, (2) mengembangkan kompilasi data administrasi (administrative record) bekerjasama dengan kantor wilayah ataupun dinas-dinas terkait, (3) melakukan pembinaan aparat Pemda tentang arti penting statistik dan peranan strategisnya bagi pemerintah dan informasi publik, (4) mendukung penyediaan data bagi penyusunan berbagai laporan hasil pembangunan, dan (5) mengembangkan penggunaan teknologi informasi untuk setiap penyelenggaraan statistik.

2). *Program Pengembangan Teknologi Informasi*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) mengembangkan sistem jaringan data elektronik antar unit kerja di lingkungan Pemda maupun antara Pemda DKI Jakarta dengan instansi lainnya, (2) mengembangkan sistem *database* untuk berbagai keperluan, (3) mengembangkan *warehouse* data, dan (4)

mengembangkan sistem penyajian data yang mudah di akses oleh masyarakat umum (*user friendly*).

3.) *Program Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menyusun sistem pengelolaan kearsipan dan dokumentasi pemerintahan daerah yang baik dan rapi, (2) melakukan komputerasi berjenjang mulai dari tingkat kelurahan dalam pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta (3) mengadakan pelatihan pengelolaan arsip pada setiap tingkat yang dibutuhkan.

4.) *Program Pengembangan Kehumasan dan Keprotokolan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: membuat dan menyusun suatu sistem keprotokolan dan kehumasan yang lebih baik, modern, dan luas, dimana segala informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, dengan aturan yang telah ditetapkan.

5.) *Program Pemetaan dan Informasi Pertanahan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) membangun sistem informasi pertanahan yang akurat dan transparan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi tata ruang kota, (2) mengembangkan sistem informasi pertanahan yang mampu meningkatkan peran masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai tuntutan kegiatan pembangunan, serta (3) menyempurnakan peta dasar kota dalam sistem global yang menjadi kebutuhan semua pihak dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan serta kegiatan yang menunjang di bidang pertanahan perkotaan.

4. Matriks Indikator Bidang Pemerintahan

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
Pemerintahan Umum	1. Program Pengembangan Otonomi Daerah	a) Terlaksananya pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah b) Meningkatnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif
	2. Program Pengembangan Pemerintahan Tingkat Propinsi	a) Terlaksananya administrasi pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang lebih tertib dan dinamis b) Terlaksananya upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan tingkat propinsi c) Terlaksananya upaya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)
	3. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Pusat	a) Terlaksananya administrasi pemerintahan Jakarta Pusat yang lebih tertib dan dinamis b) Terlaksananya upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan di wilayah Jakarta Pusat c) Terlaksananya upaya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)
	4. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Utara	a) Terlaksananya administrasi pemerintahan Jakarta Utara yang lebih tertib dan dinamis b) Terlaksananya upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan di wilayah Jakarta Utara c) Terlaksananya upaya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)
	5. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Barat	a) Terlaksananya administrasi pemerintahan Jakarta Barat yang lebih tertib dan dinamis b) Terlaksananya upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan di wilayah Jakarta Barat c) Terlaksananya upaya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)
	6. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Selatan	a) Terlaksananya administrasi pemerintahan Jakarta Selatan yang lebih tertib dan dinamis b) Terlaksananya upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan di wilayah Jakarta Selatan c) Terlaksananya upaya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)
	7. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Timur	a) Terlaksananya administrasi pemerintahan Jakarta Timur yang lebih tertib dan dinamis b) Terlaksananya upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan di wilayah Jakarta Timur c) Terlaksananya upaya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)
	8. Pengembangan Pemerintahan Kepulauan Seribu	a) Terlaksananya administrasi pemerintahan Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang lebih tertib dan dinamis b) Terlaksananya upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan di wilayah Kab. Adm. Kep. Seribu c) Terlaksananya upaya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)
	9. Penataan Administrasi Pertanahan	a) Terlaksananya penyusunan peraturan pelaksanaan di bidang pertanahan yang lebih lengkap b) Tersedianya data penguasaan, kepemilikan tanah di Propinsi DKI Jakarta c) Terlaksananya inventarisasi data lahan milik pemerintah daerah yang lebih baik
Aparatur		

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
	1. Pengembangan SDM Aparatur 2. Peningkatan Administrasi Kepegawaian 3. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	a) Terlaksananya upaya peningkatan produktifitas aparatur pemerintahan (reward and punishment) b) Tersusunnya pola kompetensi aparat daerah a) Terlaksananya tata administrasi kepegawaian yang lebih baik b) Tersedianya data dan sistem informasi kepegawaian yang lebih baik. a) Meningkatnya jumlah pegawai yang lebih profesional dan berakhlak b) Tersusunnya modul pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tuntutan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) c) Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka penyelenggaraan diklat
	4. Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan	a) Terlaksananya evaluasi tentang struktur organisasi perangkat daerah Pemda DKI Jakarta b) Terlaksananya penyempurnaan uraian jabatan perangkat daerah c) Tersusunnya tata kerja pelaksanaan pemerintahan daerah
Perencanaan dan Pengawasan	1. Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Rencana	a) Terlaksananya penyusunan perencanaan daerah yang lebih aspiratif dan partisipatif b) Meningkatnya pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan daerah c) Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan program-program daerah
	2. Penelitian dan Pengembangan 3. Peningkatan Pengawasan Fungsional	a) Terlaksananya kegiatan penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan di DKI Jakarta b) Terlaksananya dokumentasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan a) Terlaksananya mekanisme check and balances dalam tugas-tugas pengawasan b) Meningkatnya tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus KKN c) Terlaksananya penyusunan akuntabilitas kinerja bagi semua unit kerja/dinas
	4. Peningkatan Kerjasama antar Daerah	a) Meningkatnya hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan antar kota dan daerah di dalam dan luar negeri b) Meningkatnya peranserta stakeholders daerah dalam hubungan dan kerjasama antar kota dan daerah
<i>Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	1. Peningkatan Perbendaharaan Daerah 2. Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah 3. Peningkatan Penerimaan Daerah 4. Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah	a) Meningkatnya sistem perbendaharaan daerah yang lebih tertib, transparan dan efektif a) Tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel a) Meningkatnya realisasi penerimaan daerah b) Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan pengembangan sistem online. a) Tertatanya administrasi pengelolaan aset daerah dan didukung dengan data yang valid serta akurat b) Terinventarisasinya barang daerah yang lebih baik dan akurat c) Meningkatnya pengamanan aset pemerintah daerah
Sistem Informasi		

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
	1. Pengembangan Statistik Daerah	a) Tersedianya data dan informasi statistik yang lebih cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan b) Terpenuhinya kebutuhan data untuk penyusunan kebijakan, program dan evaluasi pembangunan
	2. Pengembangan Teknologi Informasi 3. Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi	a) Tersedianya sistem database/elektronik yang terpadu yang mudah diakses masyarakat b) Tersedianya sistem informasi lintas sektor dan wilayah untuk proses pengambilan keputusan c) Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi terkini dalam manajemen pemerintahan modern a) Tersedianya sistem pengelolaan arsip dan dokumentasi pemerintahan daerah yang lebih baik b) Meningkatnya akses masyarakat terhadap arsip dan dokumentasi daerah
	4. Pengembangan Kehumasan dan keprotokolan 5. Pemetaan dan Informasi Pertanahan	a) Terselenggaranya fungsi Public Relation yang lebih efektif dan efisien b) Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama dengan multi media Tersedianya sistem pemetaan dan informasi pertanahan daerah yang lebih baik

C. Bidang Ekonomi

1. Permasalahan

Meskipun Pemerintah DKI Jakarta telah berupaya melakukan terobosan untuk mengatasi krisis ekonomi namun hasilnya belum memadai, dimana roda perekonomian belum berjalan secara optimal. Kesenjangan ekonomi baik antar pelaku ekonomi maupun antar golongan pendapatan masih cukup tajam dan terjadi pada segala aspek kehidupan, sehingga struktur dan fundamental ekonomi sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi. Selain itu lambatnya pemulihan ekonomi juga disebabkan oleh berbagai faktor di luar ekonomi seperti belum stabilnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, masih lemahnya penegakan hukum, masih terjadinya perseteruan antar elit politik yang kesemuanya kurang memberi iklim kondusif pada pemulihan ekonomi.

Lambatnya pemulihan ekonomi telah menyebabkan angka pengangguran masih tetap tinggi. Disamping itu peningkatan angka pengangguran juga disebabkan oleh tekanan angkatan kerja baru, serta masih berlangsungnya urbanisasi pada

kelompok usia kerja. Penciptaan lapangan kerja baru masih terbentur pada stagnasi aktivitas ekonomi terutama dialami oleh usaha skala besar. Dalam keadaan ini, diakui usaha kecil dan menengah (UKM) telah menjadi katup pengaman dari membengkaknya angka pengangguran, bahkan UKM tetap hidup dan berkembang di saat krisis sekalipun. Untuk itu perhatian pemerintah dalam menumbuhkembangkan UKM perlu terus ditingkatkan. Aspek-aspek yang terkait dengan aktivitas mereka seperti kebutuhan modal, sarana dan prasarana ekonomi publik, tata ruang, teknologi, bahan baku dan pemasaran, perlu dikemas dalam suatu kebijakan yang integratif dan menyeluruh. Padahal fakta menunjukkan bahwa sebagian besar lapangan kerja berada di sektor ini dan hanya memperoleh bagian kecil dari kue Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan.

Walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, tetapi sesungguhnya potensi ekonomi DKI Jakarta cukup baik bahkan tidak tersaingi oleh propinsi-propinsi lain, karena disamping sebagai ibukota negara Jakarta juga merupakan pusat perdagangan dan jasa. Jakarta juga memiliki potensi sumber daya perikanan, industri, pariwisata dan sumber daya manusia berkualitas yang belum diberdayakan secara lebih terarah. Apabila potensi-potensi ekonomi ini dipadukan dengan pengembangan UKM, maka Jakarta akan memiliki struktur dan fundamental ekonomi yang lebih sehat dan dinamis, baik dalam penciptaan pendapatan, perluasan kesempatan kerja maupun keseimbangan sosial.

Upaya penataan juga masih perlu terus dilaksanakan terhadap pedagang kaki lima yang berusaha pada lokasi-lokasi strategis dan badan jalan. Perlu disiapkan peraturan yang dapat menjaga agar kelangsungan usaha tersebut tidak mengganggu ketertiban umum, termasuk kelancaran lalu lintas. Pembinaan juga perlu ditingkatkan terhadap para pedagang di pasar tradisional maupun para pelaku pengusaha kecil, termasuk koperasi baik dalam kemudahan permodalan maupun dalam kemampuan mengelola usahanya.

Dalam hal pengembangan industri pariwisata perlu diupayakan suatu sistem yang mampu mengarahkan pelaksanaan pengembangan produk dan pemasaran yang lebih terintegrasi, terukur serta mampu secara efektif meningkatkan kunjungan

wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Untuk itu masih perlu ditingkatkan sinergi antara pengembangan produk di satu pihak dan promosi di lain pihak, serta koordinasi instansi terkait yang mendukungnya. Selain itu perlu dilakukan upaya untuk memberi kemudahan informasi terpadu bagi wisman maupun wisnus.

Dalam hal pengembangan industri, perdagangan dan jasa sebagai pilar utama perekonomian DKI Jakarta perlu selalu dikaitkan dengan kehidupan dan kepentingan perekonomian rakyat, baik dalam hal pembangunan sumberdaya manusianya, pembinaan dan manajemen serta peningkatan kualitas produk barang dan jasa menuju daya saing yang kompetitif. Untuk itu penguatan basis ekonomi melalui jaringan produksi dan distribusi serta jaringan antar pelaku menjadi komponen penting dalam pengembangan ketiga sektor ini.

Dalam hal pengembangan usaha daerah, perlu dilakukan pembenahan-pembenahan yang signifikan terhadap BUMD-BUMD yang ada, melalui upaya revitalisasi, restrukturisasi/reorganisasi dan peningkatan kualitas SDM. Hal yang sama juga perlu dilakukan bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang merupakan basis perekonomian rakyat, terutama penataan pedagang kaki lima yang sudah semakin sulit dikendalikan, sementara lokasi penampungan masih sulit didapat.

Dalam hal pengembangan pertanian, perlu dipertimbangkan kondisi lahan yang sempit, sehingga diarahkan pada kegiatan agrobisnis, selain itu juga pemenuhan produk pertanian dan kehutanan tetap ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya. Demikian juga untuk peternakan dan perikanan, pemenuhan kebutuhan akan hewan ternak dan ikan perlu ditingkatkan termasuk usaha pengolahan hasil ternak dan ikan beserta ikutannya. Disamping itu, pengaturan, pengendalian *supply* dan *demand* serta pengembangan standarisasi produk, pengujian mutu dan sertifikasi atas produk serta kesehatan masyarakat veteriner, perlu diterapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan konsumen. Dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup, pelestarian hutan bakau/mangrove, dan hutan lindung, serta restrukturisasi dan refungsionalisasi kehutanan perlu mendapat perhatian.

Akhirnya penataan ekonomi daerah juga akan terkait dengan kesiapan DKI Jakarta menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Pasar bebas ASEAN (AFTA) sudah akan diberlakukan efektif mulai tahun 2003 dan pasar bebas di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2020. Sebagai pintu gerbang utama Indonesia, Jakarta harus lebih siap dibanding kota-kota lain, apalagi Jakarta ingin memainkan peranannya sebagai kota jasa (*Service City*). Produk barang dan jasa yang dihasilkan harus lebih berkualitas dan mampu bersaing, bahkan Jakarta harus menjadi laboratorium bagi pengembangan produk-produk dalam negeri berkualitas. Untuk itu pengembangan dan penguasaan teknologi serta perilaku pelayanan prima bagi semua elemen ekonomi yang ada harus menjadi terobosan baru dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat.

2. Arah Kebijakan

Arah dan kebijakan di bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi, dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peranserta usaha mikro, UKM dan koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan daya saing produk. Disamping itu juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi PD/BUMD dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan

Secara konkret upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Propinsi DKI Jakarta yang mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan, dilakukan dalam berbagai fungsi pembangunan kota mencakup pariwisata, industri dan perdagangan, usaha daerah, usaha kecil, menengah dan koperasi, peternakan dan perikanan dan kelautan, serta pertanian dan kehutanan, dengan uraian program sebagai berikut:

a. Pariwisata

1). *Program Pengembangan Produk Pariwisata*

Kegiatan yang akan dilakukan adalah : (1) mengadakan koordinasi terpadu baik antar instansi maupun masyarakat industri pariwisata, (2) menggali potensi baru obyek wisata dan menyusun kalender kegiatan untuk peningkatan daya saing pelayanan wisata menuju standar ISO, (3) merumuskan reformasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah berlandaskan pemberdayaan masyarakat melalui keterpaduan antara manusia dan lingkungannya sebagai potensi pariwisata sesuai dengan tuntutan desentralisasi dan tantangan globalisasi, (4) mengembangkan serta memperkaya kesenian dan kebudayaan tradisional (betawi), wisata belanja, wisata agro dan bahari, MICE, sebagai produk wisata potensial, dan (5) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan bagi pengembangan usaha pariwisata dan wisatawan.

2). *Program Pengembangan Pasar Pariwisata*

Kegiatan yang akan dilakukan adalah: (1) mengembangkan sistem dan jaringan informasi pariwisata antar daerah dalam rangka penguatan dan pengembangan promosi pariwisata yang terpadu ke pasar global, (2) merumuskan strategi pemasaran industri pariwisata dengan penekanan pada keterpaduan antara produk dan pemasaran pariwisata, (3) meningkatkan sarana dan prasarana untuk memperkuat jaringan pelayanan dan pemasaran produk pariwisata daerah, (4) meningkatkan aksesibilitas ke tujuan-tujuan wisata potensial sekaligus peningkatan mutu dan profesionalisme jasa pelayanan, dan (5) meningkatkan kemampuan lembaga pelayanan publik melalui peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan peraturan terkait yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata.

3). *Program Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata*

Kegiatan yang dilakukan adalah : (1) melakukan peremajaan obyek-obyek wisata, (2) menyusun network tujuan wisata dengan melakukan koordinasi

bersama dengan daerah unggulan wisata di luar Jakarta, (3) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan bagi pengembangan usaha pariwisata dan wisatawan, (4) menjamin ketersediaan akomodasi dan sarana transportasi pariwisata, (5) meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam pengembangan pariwisata.

b. Industri dan Perdagangan

1). Program Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mengembangkan struktur industri kecil yang kuat dan mandiri, (2) mengembangkan pola keterkaitan usaha produksi, distribusi dan jasa pelayanan dalam kawasan industri, (3) meningkatkan kemampuan penguasaan dan penerapan teknologi industri sesuai kebutuhan, (4) merumuskan strategi peningkatan daya saing melalui pengembangan kawasan industri berbasis tenaga kerja terampil dan terlatih, dan kawasan industri berbasis padat modal, (5) mengembangkan dan menerapkan standarisasi produk barang dan jasa sesuai kebutuhan regional dan global, dan (6) meningkatkan kualitas produk dan produktivitas usaha industri.

2). *Program Penataan dan Pengembangan Produk Industri dan Perdagangan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan efisiensi sistem produksi, teknologi pengolahan dan distribusi komoditas produk industri, (2) mengembangkan sarana dan prasarana industri, (3) mengembangkan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dan potensi wilayah dalam peningkatan produksi, (4) mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga/mikro, kecil dan menengah, (5) mendukung penyediaan akses dan kemudahan pada sumber daya potensial, terutama untuk industri kecil dan menengah.

3). *Program Penataan Jaringan Distribusi Produk Industri dan Perdagangan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan peranan UKM, koperasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan distribusi dan pemasaran

produk industri, (2) mengembangkan sistem jaringan distribusi dan pemasaran produk industri yang efisien dan efektif, (3) mendorong pengembangan daya saing produk menghadapi persaingan global yang semakin ketat, (4) meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana untuk kelancaran distribusi dan pemasaran produk industri dan (5) melakukan terobosan untuk mengurangi distorsi pada distribusi dan pemasaran barang kebutuhan masyarakat.

4). *Program Pengembangan Ekspor*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) membina dan mendorong usaha kecil dan menengah untuk berkemampuan ekspor, (2) meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia pelaku ekspor, (3) merumuskan strategi perluasan ekspor non migas melalui keterpaduan antara jenis produk dan pasar ekspor, termasuk promosi terpadu yang efektif, dan (4) meningkatkan aksesibilitas ke negara tujuan ekspor potensial.

c. Pengembangan Usaha Daerah

1). *Program Penataan dan Restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD)*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menata PD/BUMD menuju pada usaha yang sehat dan mandiri, dari sisi sumber daya, permodalan, keuangan dan manajemen, (2) melakukan restrukturisasi utang PD/BUMD, (3) merasionalisasi bidang usaha PD/BUMD dengan memperhatikan peluang pasar yang tersedia, (4) meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola, dan (5) mendorong peningkatan kualitas pelayanan produk berlandaskan transparansi dan rasa keadilan.

2). *Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Usaha Swasta Lain*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menguatkan kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia untuk menjamin terciptanya pelayanan satu atap yang efisien kepada penanam modal, (2) meningkatkan pembinaan, pengawasan dan manajemen BUMD untuk peningkatan kontribusi, (3) membentuk sistem pemantauan untuk mengidentifikasi praktek-praktek yang

menghambat investasi dan meningkatkan kepekaan terhadap berbagai keluhan masyarakat, (4) menata ulang desain dan peruntukan sarana dan prasarana ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan RTRW, (5) meningkatkan kerjasama ekonomi saling menguntungkan antar daerah, bilateral dan multilateral, dan (6) meningkatkan promosi investasi di dalam dan luar negeri dengan efektifitas yang tinggi.

3). *Program Pemberdayaan Aset Daerah*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) melakukan inventarisasi ulang dan sertifikasi asset daerah, dan (2) melakukan penagihan fasos/fasum yang menjadi kewajiban swasta.

d. Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

1). *Program Penataan Kaki Lima dan Usaha Skala Mikro*

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : (1) mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, (2) meningkatkan akses yang lebih luas bagi usaha mikro kepada sumber daya produktif, dan (3) mengembangkan basis ekonomi DKI Jakarta yang lebih kuat bagi kehidupan ekonomi partisipatif.

2). *Program Pemberdayaan UKM dan Koperasi*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menyempurnakan peraturan daerah, perijinan, birokrasi, dan retribusi terkait dengan UKM, (2) mendorong pengembangan dan penerapan teknologi yang lebih cocok untuk UKM, (3) melakukan penataan kaki lima melalui pendekatan estate management dengan pemberdayaan masyarakat agar tertib dan nyaman, sehingga diharapkan dapat mendukung pariwisata, (4) meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan usaha terhadap persaingan yang tidak sehat, dan (5) mengembangkan koperasi sebagai suatu gerakan masyarakat.

3). *Program Pengembangan Kewirausahaan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) memasyarakatkan kewirausahaan dan pola usaha produktif bagi UKM yang belum berkembang termasuk pasar-pasar tradisional, (2) mengembangkan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi, (3) mengembangkan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, (4) mengembangkan kemitraan usaha antara UKM dengan perusahaan besar yang menerapkan alih teknologi atau manajemen modern kepada UKM mitranya, dan (5) mengembangkan inkubator bisnis dan teknologi terutama yang dikelola oleh dunia usaha/masyarakat untuk mendukung pengembangan UKM dan wirausaha baru.

4). *Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menciptakan skema kredit usaha kecil yang menjunjung rasa keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik, (2) membentuk lembaga keuangan mikro yang mengarah pada pelayanan satu atap, dan (3) meningkatkan koordinasi lintas pelaku untuk mengoptimalkan penyaluran dan pengembalian kredit usaha kecil.

e. Peternakan, Perikanan dan Kelautan

1). *Program Pengembangan Produksi Peternakan dan Perikanan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mengoptimalkan pemanfaatan lahan peternakan dan perikanan, (2) mengendalikan akses lingkungan dari keberadaan usaha peternakan dan perikanan, (3) meningkatkan produksi perikanan dan peternakan yang didukung oleh peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi dan produktivitas masyarakat nelayan dan peternak, (4) mengembangkan dan menerapkan standar penilaian mutu produk dan pengawasannya, dan (5) meningkatkan akses masyarakat peternak dan perikanan pada sumber-sumber permodalan, teknologi dan informasi pasar.

2). *Program Penataan Distribusi Hasil Peternakan dan Perikanan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menjalin kerjasama antar daerah dalam ketahanan pangan (produk hewan konsumsi, (2) mengembangkan standarisasi mutu produk peternakan dan perikanan, (3) meningkatkan produksi perikanan yang didukung oleh peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi dan produktivitas masyarakat nelayan, (4) meningkatkan akses nelayan terhadap sumber daya modal, teknologi, benih/bibit dan informasi pasar, dan (5) mengembangkan sistem penyediaan dan distribusi produk peternakan dan perikanan yang menjamin kelancaran penyaluran produk.

3) *Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut Serta Satwa*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) melakukan inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya laut yang dimiliki DKI Jakarta, (2) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut untuk kegiatan ekonomi produktif, (3) meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sumber daya laut, (4) mengembangkan koordinasi kebijakan dan program pelestarian lingkungan, dan (5) menyusun informasi peta potensi pengembangan sumber daya laut.

f. Pertanian dan Kehutanan

1) *Program Pengembangan Produksi, Pemasaran Pertanian dan Kehutanan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pertanian lahan sempit untuk peningkatan produksi, seperti hidroponik untuk sayuran dan bioteknologi/bioperforasi untuk buah-buahan, (2) memperluas pemanfaatan kawasan pertanian termasuk lahan tidur dan lahan kurang produktif lainnya dengan tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan yang berlaku, (3) membina kelompok tani dan kinerja aparat, (4) menginventarisir dan mengevaluasi sumber daya lahan pertanian yang ada di DKI Jakarta, dan (5) mengembangkan wisata agro untuk mendukung pengembangan wisata minat khusus. (6) meningkatkan kerjasama dengan daerah lain untuk menjaga

stabilitas pengadaan pangan, (7) mengembangkan sistem pengadaan, distribusi dan penyaluran bahan pangan, dengan memperhatikan skala usaha dan penyebaran lokasi, termasuk fungsi dan peran Dolog serta Pasar Induk Cipinang, (8) meningkatkan promosi hasil-hasil pertanian, (9) menyusun produk hukum untuk retribusi hasil hutan, (10) meningkatkan pengawasan terhadap hasil hutan di Jakarta, dan (11) meningkatkan pengelolaan dan kualitas hasil hutan

2). *Program Pengembangan Kehutanan*

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : (1) meningkatkan pembibitan untuk program penghijauan, (2) mengembangkan hutan kota, (3) meningkatkan penataan hutan dan kawasan lindung, dan (4) meningkatkan fungsi hutan kota dan peran serta masyarakat dalam kepedulian terhadap penghijauan dan hutan kota.

4. Matriks Bidang Ekonomi

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
Pariwisata		
	1. Pengembangan Produk Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya penyempurnaan draft RIPPDA b) Meningkatnya jumlah serta kualitas produk/obyek wisata c) Terlaksananya peningkatan keterampilan & kemampuan SDM pariwisata
	2. Pengembangan Pasar Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk buletin, brosur, video serta media internet b) Tercapainya jumlah wisatawan mancanegara sebesar 1,3 juta orang c) Tercapainya jumlah wisatawan nusantara sebesar 9,9 juta d) Meningkatnya PAD sektor pariwisata menjadi 530 milyar e) Meningkatnya jumlah devisa sektor pariwisata f) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pariwisata g) Meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata
	3. Program Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya kualitas 4 (empat) graha wisata dan 1 (satu) anjungan TMII b) Terselenggaranya pembinaan usaha-usaha terkait pariwisata

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
Industri dan Perdagangan		
	1. Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya kualitas pelayanan 4 (empat) Balai & Gedung Dinas b) Meningkatnya kegiatan promosi dan pemasaran produk industri c) Tercapainya ISO-9000 untuk 50 Unit Perusahaan Bidang IKAHH dan 10 Unit Perusahaan Bidang ILMEA d) Terselenggaranya pelatihan ISO 14000 atau Eco Labelling & Produksi untuk 50 Perusahaan e) Tersedianya peralatan lapangan jar tester untuk mendeteksi kasus pencemaran dengan cepat dan akurat f) Terlaksananya pembinaan SDM Indag g) Tercapainya HAKI untuk 10 buah merk produk h) Meningkatnya jumlah Wira Usaha Baru di bidang Indag
	2. Penataan dan Pengembangan Produk Industri dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya penertiban usaha dan perlindungan konsumen di bidang Indag b) Terwujudnya konsep Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai pelaksanaan amanat UU Perlindungan Konsumen c) Terlaksananya sosialisasi peningkatan PAD bagi para pengusaha Indag d) Tersedianya Pusat Promosi & Informasi Produk Meubel di Propinsi DKI Jakarta
	3. Penataan Jaringan Distribusi Produk Industri dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya Temu Kemitraan antara Industri Kecil Dagang Kecil dengan Asosiasi b) Terlaksananya kerjasama antar propinsi dalam bidang Indag
	4. Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya ekspor non migas b) Meningkatnya diversifikasi dan variasi desain produk ekspor c) Terlaksananya perluasan pasar ke Timur Tengah, Afrika dan Eropa Timur d) Terlaksananya pembinaan pengusaha ekspor dalam memanfaatkan sistim jaringan perdagangan internasional e) Meningkatnya jumlah dan kualitas serta diversifikasi produk untuk andalan ekspor
Pengembangan Usaha Daerah		
	1. Penataan dan Restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT Patungan)	<ul style="list-style-type: none"> a) Terbentuknya 1 Sub Holding Company dalam bidang pariwisata b) Terlaksananya pemantauan hasil audit dalam penentuan profit PD/BUMD/PT Patungan c) Meningkatnya PAD dari PD/BUMD/PT Patungan
	2. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Usaha Swasta Lain	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi b) Terlaksananya kajian One Stop Service c) Terlaksananya promosi investasi
	3. Pemberdayaan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya jumlah aset daerah yang dimanfaatkan b) Terlaksananya evaluasi bagi jumlah asset daerah yang dimanfaatkan c) Terlaksananya penyusunan Data Base Sistem Manajemen Asset Daerah

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	1. Penataan Kaki Lima dan Usaha Skala Mikro	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya produktivitas usaha skala mikro b) Meningkatnya jumlah Usaha Sektor Informal Tradisional menjadi Usaha Formal c) Meningkatnya penataan lokasi Usaha Sektor Informal Tradisional dan pedagang kaki lima d) Meningkatnya kelembagaan USIT melalui penataan kelompok pra koperasi e) Tersedianya kebijakan yang diterbitkan dalam rangka pemberdayaan USIT f) Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang dapat ditampung dilokasi pertokoan g) Meningkatnya jumlah usaha lokasi kaki lima yang dikelola manajemen kawasan
	2. Pengembangan Kewirausahaan 3. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif b) Meningkatnya USP Koperasi c) Meningkatnya usaha garmen, handicraft, agro industri dan jasa rekaman yang dikelola UKM a) Tersusunnya penyempurnaan sistem pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) b) Terlaksananya pilot project pembentukan lembaga penjamin KUKM c) Meningkatnya jumlah usaha simpan pinjam d) Meningkatnya jumlah dana bergulir e) Meningkatnya jumlah usaha mikro dan UKM yang mampu mengakses sumber permodalan f) Meningkatnya jumlah koperasi yang mampu mengakses sumber permodalan
Peternakan, Perikanan dan Kelautan	1. Pengembangan Produksi Peternakan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya produksi peternakan unggulan terutama sapi perah dan unggas b) Meningkatnya kesehatan hewan ternak c) Meningkatnya produksi perikanan darat, laut dan ikan hias d) Meningkatnya ekspor hasil produksi perikanan e) Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi dan pengolahan produk perikanan dan peternakan f) Meningkatnya produktivitas nelayan g) Tersedianya informasi dan website peternakan, perikanan dan kelautan h) Terlaksananya pendaftaran hak paten hasil peternakan dan perikanan unggulan i) Terbangunnya kolam pendederan benih ikan j) Terbangunnya tanggul pemecah gelombang, gedung pelelangan ikan dan dermaga pendaratan ikan di Muara Angke k) Tersedianya dukungan bagi peningkatan jumlah kapal ikan l) Terlaksananya pelatihan SDM peternakan dan perikanan m) Tersedianya bibit unggul peternakan dan perikanan

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
	2. Penataan Distribusi Hasil Peternakan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kerjasama dengan daerah produsen lainnya dalam pengadaan dan penyaluran hewan ternak b. Terlaksananya pembinaan bagi peningkatan kualitas dan keamanan produk peternakan dan perikanan yang dipasarkan c. Terlaksananya pengawasan lalulintas peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) d. Terlaksananya pembinaan teknologi pengemasan produk olahan hasil perikanan e. Meningkatnya pengendalian penyakit hewan f. Tersedianya sarana dan prasarana pengujian mutu peternakan dan perikanan antara lain laboratorium dan peralatannya g. Terselenggaranya promosi dan pemasaran produk peternakan dan perikanan
	3. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut	<ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya pengelolaan fishing ground dan terumbu karang b) Meningkatnya diversifikasi usaha ekonomi kelautan non perikanan c) Terselenggaranya pengawasan dan monitoring untuk kelestarian sumber daya laut d) Tersedianya fish shelter
Pertanian dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Produksi, Pemasaran Pertanian dan Kehutanan 2. Pengembangan Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya produksi hortikultura bernilai tinggi b) Meningkatnya pemanfaatan lahan dan teknologi pertanian lahan sempit c) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi bahan pangan d) Terselenggaranya sosialisasi dan temu usaha bagi masyarakat dan swasta dalam mengembangkan agribisnis pertanian e) Terlaksananya pengawasan dan penertiban pemasaran dan konsumsi kayu dan hasil hutan lainnya f) Tersedianya sarana dan prasarana pengujian kayu dan olahan hasil hutan g) Tersedianya sarana dan prasarana agrowisata di 2 (dua) lokasi a) Meningkatnya kualitas hutan kota, hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu b) Meningkatnya luas ruang terbuka hijau (RTH) kehutanan c) Meningkatnya jumlah penangkaran satwa langka d) Terselenggaranya sosialisasi pengembangan hutan dan pemanfaatannya kepada masyarakat

D. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1. Permasalahan

Krisis ekonomi, membengkaknya pengangguran dan merosotnya pendapatan masyarakat telah menyebabkan semakin banyaknya keluarga yang tidak dapat lagi membiayai pendidikan putra-putrinya terutama pada pendidikan tingkat SLTP ke atas. Akibatnya jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah relatif besar dan mereka terpaksa bekerja untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga, yang sangat kontra-produktif dengan program wajib belajar 9 tahun.

Di bidang pendidikan sendiri, keadaannya juga belum mendukung tercapainya proses belajar-mengajar yang lebih baik. Walaupun tidak sedikit dari pelajar yang berprestasi baik, tetapi masih ada juga kasus-kasus tawuran pelajar yang menjurus pada tindak kriminal. Ini menyebabkan pendidikan dan proses belajar-mengajar seakan-akan menjadi kurang bermakna. Muatan kurikulum yang berorientasi pada penguatan akhlak dan moral serta pendidikan agama masih perlu ditingkatkan dalam hal praktek dan implementasinya, sehingga tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dunia pendidikan dirasakan masih kurang memiliki kepekaan yang cukup untuk membina dan mengembangkan sikap toleransi dan kebersamaan dalam perbedaan. Dilain pihak guru sebagai profesi yang memikul tanggung jawab yang berat untuk mendidik siswa agar menjadi generasi penerus yang berguna bagi bangsa dan negara juga perlu mendapat perhatian terutama dalam hal kesejahteraannya, demikian juga halnya dengan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Dunia pendidikan juga menghadapi tantangan dan tanggung jawab sebagai subsistem dalam mempersiapkan SDM yang lebih berkualitas untuk menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas.

Dengan demikian, bidang pendidikan memerlukan perhatian serius dan menyeluruh, agar semua anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan 9 tahun bahkan 12 tahun, sekaligus menata kembali manajemen pendidikan sesuai dengan perkembangan otonomi daerah. Hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan kuantitas pemberian subsidi dana dan bantuan alat-alat sekolah bagi pelajar dari

keluarga tidak mampu dari tingkat pendidikan dasar/ sederajat sampai dengan pendidikan menengah dan tinggi/ sederajat.

Di bidang kesehatan, golongan masyarakat yang kurang mampu, karena pendapatan dan kesejahteraan yang rendah masih ada yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya, karena dibebani pada pemenuhan kebutuhan lain untuk keluarganya. Disamping itu lingkungan perumahan yang tidak sehat, karena tinggal di pemukiman kumuh, menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat menjadi rendah dan rentan terhadap berbagai wabah penyakit. Ketidakmampuan mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup serta tingkat pengetahuan gizi yang rendah juga mempengaruhi ketidakmampuan dalam pemenuhan gizi pada sebagian masyarakat. Fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan serta SDM kesehatan juga masih perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama yang menyangkut Posyandu, Puskesmas, RSUD dan penanganan gawat darurat, agar pelayanan kesehatan dapat merata melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mutu yang makin baik.

Masalah menonjol lainnya di bidang kesehatan adalah terbatasnya fasilitas pencegahan dan pelayanan penanganan serta penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba) di kalangan remaja. Masalah ini menjadi serius karena kecenderungan semakin meluasnya penggunaan narkoba yang mengancam masa depan generasi muda.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan pemerintah DKI Jakarta adalah meningkatkan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka wajib belajar 9 tahun, pemerataan kualitas dan cakupan pendidikan serta pemerataan layanan kesehatan.

3. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan

Program-program pembangunan yang tercakup dalam bidang pendidikan dan kesehatan, menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan

1). *Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar*

Kegiatan yang dilakukan dalam pemerataan pendidikan sekolah tingkat dasar antara lain : (1) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin, kumuh, berpindah-pindah, anak jalanan, seperti SD/MI dengan satu guru, guru kunjung/sistem tutorial, (2) meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (bangunan sekolah) SD,MI, SLTP dan MTs di semua wilayah termasuk sarana dan prasarana olahraga, (3) memberikan subsidi pendidikan bagi sekolah swasta agar sekolah-sekolah swasta mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, (4) melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (*regrouping*) sekolah-sekolah terutama SD/MI, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai, (5) memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, (6) meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya agar dapat meningkatkan kualitas dan citra pendidikan, (7) meningkatkan penyediaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan, buku pelajaran pokok, buku bacaan dan alat pendidikan lainnya, (8) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar-mengajar, (9) melakukan pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan, (10) menyusun kurikulum pendidikan dasar yang lebih berorientasi pada hal praktek dan implementasi, (11) meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan sehingga peran dan tanggung jawab sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata, (12) mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya

pendidikan, (13) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti diversifikasi penggunaan sumber daya dan dana, (14) mengembangkan sistem insentif yang mendorong kompetisi yang sehat baik antar lembaga maupun personel sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, (15) memberdayakan personel dan lembaga secara profesional, antara lain melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional, serta (16) meninjau kembali semua perda di bidang pendidikan yang tidak sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan.

2). *Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mengembangkan berbagai jenis pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada kondisi dan potensi lingkungan, dengan mendayagunakan prasarana dan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat, (2) mempercepat penuntasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional, khususnya bagi penduduk usia 7-18 tahun, (3) mengaktifkan taman bacaan dan perpustakaan yang sudah ada, agar warga gemar membaca buku, (4) meningkatkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan pendidikan, kualitas dan kuantitas warga masyarakat belajar Kejar Paket A dan B yang setara SD dan SLTP, serta (5) mengembangkan model pembelajaran untuk program pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan.

3). *Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Umum dan Kejuruan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung yaitu masyarakat tidak mampu, kumuh, dan anak jalanan, (2) memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, (3) melakukan pendekatan pada dunia usaha dan dunia industri untuk melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah menengah, khususnya pendidikan menengah kejuruan, (4) mengembangkan program-program keterampilan pada SMU/SMK/MA yang sesuai dengan lingkungan setempat

atau tuntutan dunia kerja setempat agar para lulusan SMU/SMK/MA yang tidak memiliki peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dapat bersaing dalam memasuki dunia kerja, (5) meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sehingga peran dan tanggung jawab sekolah-sekolah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata, (6) membangun dan merehabilitasi sekolah dengan prasarana yang memadai, (SMU, SMK dan MA) termasuk sarana olahraga, (7) memberikan subsidi untuk sekolah swasta, yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang kemampuan ekonominya lemah, seperti dalam bentuk imbal swadaya dan bentuk bantuan lainnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah antara lain : (1) meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, antara lain melalui pemberian akreditasi dan sertifikasi mengajar bidang tertentu yang ditinjau dan dievaluasi secara periodik, (2) meningkatkan kreativitas guru, inklusif dan tidak bias gender sesuai dengan kapasitas peserta didik, (3) mengembangkan lomba karya ilmiah dan sejenisnya yang disesuaikan dengan standar yang dipakai di dunia pendidikan nasional, (4) meningkatkan pengadaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk buku dan alat peraga, perpustakaan, komputer dan laboratorium bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta secara bertahap, (5) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, (6) melakukan pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan manajemen pendidikan sekolah tingkat menengah umum dan kejuruan antara lain : (1) membentuk dan meningkatkan peranan komite sekolah meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta

mendorong daerah untuk melaksanakan rintisan penerapan konsep pembentukan dewan sekolah, (2) mengembangkan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat menjadi mitra kerja pemerintah yang serasi dalam pembinaan pendidikan menengah, (4) mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, (5) mengembangkan sistem insentif yang mendorong kompetisi yang sehat antar lembaga dan personel sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, (6) memberdayakan personel dan lembaga antara lain dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional, (7) meninjau kembali semua perda di bidang pendidikan yang tidak sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan, dan (8) merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen.

4). *Program Pengendalian dan Peningkatan Informasi Perguruan Tinggi*

Kegiatan yang akan dilakukan antara lain : (1) melakukan koordinasi penelitian mengingat makin bertambahnya baik jenis maupun kualitas penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, agar tidak terjadi tumpang tindih penelitian antar perguruan tinggi, (2) mengusahakan agar jenis penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dunia usaha dan pemerintah DKI Jakarta, (3) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses perkuliahan yang bermutu, (4) melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan daerah, (5) melakukan kerjasama di bidang pendidikan dengan berbagai lembaga di dalam ataupun di luar negeri, untuk mendapatkan informasi kebutuhan lembaga dan mutu pendidikan tinggi, (6) mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi dan pendataan untuk semua jalur, jenis, dan jenjang, serta kondisi daerah, dan (7)

mengembangkan dan memantapkan pusat-pusat unggulan di lembaga riset masing-masing perguruan tinggi.

5). *Program Pengembangan Perpustakaan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menambah jumlah dan jenis bahan bacaan/pustaka, (2) melakukan reformasi perpustakaan dari segi tampilan fisik perpustakaan agar menambah minat baca masyarakat, (3) meningkatkan keterampilan dan profesionalisme pustakawan melalui jabatan fungsional pustakawan, (4) meningkatkan pengetahuan pustakawan melalui pendidikan formal/non formal, dan (5) mengembangkan jangkauan pelayanan perpustakaan baik dengan penambahan perpustakaan ataupun dengan perpustakaan keliling.

b. Kesehatan Masyarakat

1). *Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan kualitas, profesionalisme dan dedikasi petugas pelayan kesehatan, (2) meningkatkan advokasi dan promosi kesehatan masyarakat, (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (4) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan hidupnya.

2). *Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) melakukan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pelayanan kesehatan masyarakat, (2) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, (3) mempercepat proses pelayanan tanpa mengurangi akurasi, (4) mengembangkan kebijakan manajemen yang mendukung kegiatan pelayanan yang profesional, (5) mengembangkan dan menyebarluaskan sistem informasi kesehatan pada masyarakat, dan (6) memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu, melalui "kartu sehat".

3). *Program Penanganan Gawat Darurat*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan di unit gawat darurat, Puskesmas, Pra RS dan RS, (2) meningkatkan kualitas, profesionalisme dan dedikasi petugas pelayanan kesehatan gawat darurat, (3) mempercepat proses pelayanan tanpa mengurangi akurasi, dan (4) memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu, serta (5) sistem manajemen penanggulangan gawat darurat dan bencana di DKI Jakarta.

4). *Program Perbaikan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mengadakan sarana dan prasarana, (2) menyempurnakan sistem perencanaan dan pembiayaan kesehatan, (3) mengembangkan sumber daya manusia, (4) meningkatkan mutu pelayanan, (5) menyelenggarakan promosi kesehatan, (6) menyelenggarakan kegiatan kemitraan, dan (7) mengembangkan sistem informasi kesehatan.

4. Matriks Indikator Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
Pendidikan	1. Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar	<ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya rehab total 25 gedung SD/MI b) Tersedianya 20 ruang kelas baru SD/MI c) Terlaksananya rehab berat dan ringan 160 gedung SD/MI d) Meningkatnya penyediaan perabot SD/MI e) Terlaksananya peningkatan kualitas guru f) Tersedianya alat penunjang dan laboratorium sebanyak 100 paket g) Meningkatnya penyediaan buku wajib dan penunjang SD/MI dan SLTP/MTs h) Terlaksananya pendidikan ekstrakurikuler i) Terlaksananya rehab total 23 gedung SLTP/MTs j) Tersedianya 23 ruang kelas baru SLTP/MTs k) Terlaksananya rehab berat dan ringan 50 gedung SLTP/MTs l) Meningkatnya penyediaan perabot SLTP/MTs m) Terlaksananya pendidikan berbasis sekolah n) Tersedianya layanan pendidikan dasar bagi masyarakat tidak mampu
	2. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> a) Tercapainya program Kejar Paket A dan B b) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah dengan baik c) Meningkatnya pengembangan pendidikan sekolah luar biasa

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
	<p>3. Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Umum dan Kejuruan</p> <p>4. Pengendalian dan Peningkatan Informasi Perguruan Tinggi</p> <p>5. Pengembangan perpustakaan</p>	<p>a) Terlaksananya rehab total 20 gedung SMU/SMK/MA</p> <p>b) Tersedianya 20 ruang kelas baru SMU/SMK/MA</p> <p>c) Terlaksananya rehab berat dan ringan 40 gedung SMU/SMK/MA</p> <p>d) Meningkatnya penyediaan perabot SMU/SMK/MA 50 paket</p> <p>e) Meningkatnya penyediaan buku wajib dan penunjang bagi SMU/SMK/MA</p> <p>f) Terlaksananya peningkatan kualitas guru</p> <p>g) Tersedianya alat penunjang dan laboratorium</p> <p>h) Terlaksananya pendidikan berbasis sekolah</p> <p>i) Tersedianya pendidikan menengah bagi masyarakat tidak mampu</p> <p>j) Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan</p> <p>k) Meningkatnya kegiatan ekstrakurikuler SMU/SMK/MA</p> <p>a) Tersedianya pedoman pengendalian dan informasi perguruan tinggi</p> <p>b) Terlaksananya pengadaan alat praktek dan bantuan operasional bagi Perguruan Tinggi Negeri</p> <p>a) Meningkatnya jumlah dan jenis bahan pustaka</p> <p>b) Meningkatnya layanan perpustakaan ke seluruh wilayah</p> <p>c) Meningkatnya minat baca masyarakat</p> <p>c) Meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan</p> <p>d) Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan umum yang memadai</p>
Kesehatan	<p>1. Peningkatan Kesehatan masyarakat</p> <p>2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan</p>	<p>a) Meningkatnya persentase cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</p> <p>b) Meningkatnya kualitas petugas pelayanan kesehatan</p> <p>c) Meningkatnya jumlah dan jenis pelayanan pencegahan sakit</p> <p>d) Meningkatnya cakupan pemeriksaan oleh sarana pelayanan kesehatan</p> <p>e) Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah, malaria dan TBC</p> <p>f) Meningkatnya kewaspadaan terhadap berkembangnya penyakit HIV/Aids</p> <p>a) Meningkatnya sarana kesehatan yang melaksanakan Quality Assurance (QA)</p> <p>b) Meningkatnya cakupan imunisasi untuk 70.000 murid SD/MI</p> <p>c) Meningkatnya cakupan pelayanan UKGS untuk 90.000 murid</p> <p>d) Meningkatnya pengobatan TBC bagi 6.000 orang</p> <p>e) Meningkatnya proporsi tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk per satuan wilayah</p> <p>f) Meningkatnya proporsi fasilitas kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk per satuan wilayah</p>

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
	3. Penanganan Gawat Darurat	a) Meningkatnya persentase jumlah pasien yang tertangani, terutama masyarakat tidak mampu b) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di unit gawat darurat c) Semakin cepatnya waktu pelayanan dan penanganan pasien gawat darurat d) Berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kesehatan di unit gawat darurat e) Bertambahnya 50 unit ambulans
	4. Program perbaikan kebijakan dan manajemen kesehatan	a) Bertambahnya 10 (sepuluh) SK Gubernur bidang kesehatan b) Terselenggaranya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

E. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Permasalahan

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dari segala persoalan pembangunan di Propinsi DKI Jakarta. Hampir semua kegiatan pembangunan terarah dan terkait dengan masalah penduduk, dimana penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar dan kualitas yang rendah akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara optimal.

Di bidang kependudukan, persoalan yang menjadi tantangan adalah belum tertibnya administrasi kependudukan yang menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dan terkini mengenai bidang kependudukan. Padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk perencanaan berbagai aspek kependudukan, termasuk perencanaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, ketentraman dan ketertiban dan sebagainya. Penyuluhan masalah tertib administrasi kependudukan, termasuk penerapan *law enforcement* serta pengendalian penduduk sudah harus dimulai, apabila DKI Jakarta tidak ingin menjadi wilayah yang padat dan kumuh dengan daya dukung lingkungan hidup perkotaan yang semakin berkurang.

Di bidang ketenagakerjaan, persoalan utama yang dihadapi adalah belum seimbangnya penyediaan lapangan kerja (karena terbatasnya *economic scale*) dengan mereka yang membutuhkan pekerjaan. Akibatnya tingkat pengangguran cenderung masih tinggi, itupun sebagian sudah ditampung ke dunia kerja melalui sektor informal. Persoalan kedua adalah kualitas tenaga kerja yang masih rendah dan sebagian merupakan pendatang (kaum urban) dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah.

2. Arah Kebijakan

Masalah kependudukan dan ketenagakerjaan di DKI Jakarta merupakan masalah yang kompleks yang harus dihadapi dan diupayakan pemecahannya oleh pemerintah daerah dengan menetapkan arah dan kebijakan yang menjadi pedoman dan arah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan adalah meningkatkan pengendalian penduduk dan sumber daya tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan produktivitas masyarakat. Walaupun DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara bebas didatangi atau dihuni oleh seluruh warga Negara Indonesia, namun penyaringan untuk dapat menjadi penduduk DKI Jakarta, harus tetap dilaksanakan secara ketat, sehingga para pendatang baru yang tidak memiliki keterampilan, pekerjaan, modal kerja atau yang hanya sekedar mengadu nasib, tidak menimbulkan masalah negatif bagi kehidupan masyarakat lainnya atau menjadi beban Pemerintah Daerah. Pada sisi lain kebutuhan akan keberadaan Balai Latihan Kerja Daerah. Perlu menjadi perhatian, untuk itu wilayah kota yang belum tersedia Balai Latihan Kerja Daerah perlu dibangun sesuai dengan standard yang memadai.

3. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bidang pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan, maka disusun program-program daerah sebagai berikut :

a. Kependudukan

1). *Program Pengendalian Kependudukan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) melaksanakan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling KB, (2) melakukan pelatihan, pengkajian dan penelitian operasional pembangunan KB, (3) menyelenggarakan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kelangsungan hidup ibu, bayi dan balita, (4) meningkatkan manajemen dan kapasitas kelembagaan program KB tingkat propinsi dan kotamadya/kabupaten administratif, (5) menyediakan informasi tentang KB dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, (6) menyediakan alat/obat kontrasepsi dan memberikan pelayanan KB yang berkualitas, termasuk kontrasepsi mantap untuk laki-laki dan perempuan bagi keluarga golongan Pra Sejahtera dan Sejahtera I, (7) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan KB dan bantuan operasional klinik KB, (8) melaksanakan upaya peningkatan partisipasi pria dalam KB, (9) memberikan jaminan dan perlindungan pemakai kontrasepsi yang diprioritaskan pada penanggulangan efek samping secara medis, (10) menyelenggarakan pelayanan pencabutan implan secara cuma-cuma bagi ibu golongan Pra KS dan KS I, (11) menyelenggarakan sistem informasi manajemen KB, serta (12) meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga tentang persiapan dan perawatan kehamilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ibu, bayi dan anak.

Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan kesehatan reproduksi remaja antara lain : (1) melakukan penyempurnaan dan diseminasi bahan dan metode konseling dan komunikasi, informasi, edukasi kesehatan reproduksi remaja, (2) melakukan penyuluhan terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja, (3) menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja bagi remaja, keluarga dan masyarakat, (4) memfasilitasi pembentukan institusi pusat konseling kesehatan reproduksi

remaja, dan (5) menyelenggarakan pelatihan tenaga inti konseling kesehatan reproduksi remaja.

Kegiatan yang dilakukan pada upaya penguatan kelembagaan dan jaringan KB, antara lain : (1) meningkatkan manajemen dan kapasitas kelembagaan program KB tingkat propinsi dan kotamadya/kabupaten administratif, (2) melakukan pelatihan teknis dan bimbingan manajemen bagi penyedia pelayanan KB, (3) menyediakan dukungan manajemen KB di setiap tingkatan administrasi, terutama di kelurahan dan kecamatan, dan (4) menyediakan informasi tentang KB dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Kegiatan yang dilakukan pada transmigrasi, antara lain : (1) melaksanakan sosialisasi, termasuk didalamnya komunikasi, informasi, edukasi dan konsultasi transmigrasi serta pelatihan, (2) kerjasama dengan daerah tujuan, (3) pengiriman transmigran, dan (4) pembinaan transmigran di daerah tujuan.

2) *Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

Kegiatan yang dilakukan pada program ini antara lain : (1) membentuk dan mengembangkan data base kependudukan di setiap tingkat kelurahan, (2) melakukan pengendalian bagi penduduk pendatang baru, (3) melakukan penertiban, pelayanan kependudukan, (4) meningkatkan program KB, (5) meningkatkan program satpraja dalam pengendalian penduduk, (6) menyempurnakan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta (7) melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya pelaporan mengenai kelahiran, kematian, perpindahan penduduk.

b. Tenaga Kerja

1). *Program Pengembangan Kesempatan Kerja*

Kegiatan yang akan dilakukan antara lain : (1) mewujudkan perluasan kesempatan kerja dan usaha, (2) meningkatkan kemampuan tenaga kerja,

dan (3) menciptakan peluang kerja dan usaha bagi pekerja serta tenaga kerja penyandang cacat.

2). *Program Perlindungan dan Pengendalian Tenaga Kerja*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) memberikan penyuluhan tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja dalam rangka perlindungan hari tua, (2) mewujudkan perlindungan, pengawasan dan penegakkan hukum khususnya bagi tenaga kerja wanita dan anak, dan (3) menyelesaikan kasus pelanggaran ketenagakerjaan.

3). *Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mengoptimalkan kegiatan Balai Latihan Kerja melalui peningkatan alokasi anggaran, (2) meningkatkan upah minimum yang layak bagi tenaga kerja secara periodik, dan (3) mewujudkan pelatihan tenaga kerja, baik kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri.

4. Matriks Indikator Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
Kependudukan	1. <i>Pengendalian Kependudukan</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Menurunnya jumlah perkawinan usia dini b) Menurunnya jumlah kehamilan remaja c) Meningkatnya jumlah peserta KB d) Menurunnya angka kelahiran total e) Meningkatnya prosentase pasangan usia subur yang terlayani program KB f) Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang ber KB mandiri
	2. <i>Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya database kependudukan yang lebih akurat dan lengkap b) Tersedianya administrasi kependudukan yang baik c) Terlaksananya sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukan dan operasi yustisi d) Meningkatnya penduduk yang memiliki akta catatan sipil
KETENAGAKERJAAN		
	1. Pengembangan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya informasi ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja untuk masyarakat b) Meningkatnya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri c) Terciptanya peluang kerja dan usaha bagi pekerja dan angkatan kerja

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
	2. Perlindungan dan Pengendalian Tenaga Kerja	a) Meningkatnya perlindungan, pengawasan dan penegakkan hukum ketenagakerjaan khususnya bagi perempuan b) Berkurangnya kasus pelanggaran ketenagakerjaan c) Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi oleh program Jamsostek
	3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	a) Meningkatnya upah dan produktivitas tenaga kerja b) Meningkatnya pelatihan tenaga kerja c) Meningkatnya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja

F. Bidang Sosial Budaya

1. Permasalahan

Bidang sosial budaya mencakup aspek yang sangat luas meliputi aspek kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, seni budaya, permuseuman, olahraga dan kepemudaan. Namun demikian dalam banyak hal berbagai aspek ini saling kait-mengait yang memerlukan penanganan secara terpadu.

Beragamnya masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta dapat menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang bersifat primordial dan partisan. Sebagian dari mereka terutama akar rumput (*grass-root*) sangat fanatik terhadap kelompoknya sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai saingan atau musuhnya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi menjadi perkelahian masal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebab yang sangat kecil.

Masalah sosial lainnya yang timbul akibat krisis ekonomi dan sulitnya lapangan kerja adalah semakin banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sebagian dari mereka adalah para pengamen, pedagang di lampu lalu lintas, pengemis dan anak jalanan yang memerlukan perhatian dan pertolongan di satu sisi tetapi juga dibutuhkan ketegasan dalam penanganannya di lain pihak, karena

berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Sementara itu, jumlah pengguna narkoba juga semakin bertambah.

Banyaknya masyarakat yang terpuruk akibat krisis multi dimensi yang lalu, bukan hanya menyebabkan pendapatan mereka turun drastis, tetapi juga banyak diantara golongan masyarakat kecil itu kehilangan pekerjaan ataupun usahanya menjadi bangkrut. Tentunya kondisi ini tidak boleh berlangsung secara terus menerus dan harus ditanggulangi segera, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan.

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan peranan perempuan juga perlu ditingkatkan, termasuk upaya memberikan pemahaman yang benar pada makna kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

Masalah sosial lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah mengenai pelayanan pemakaman, dimana diharapkan kantor pelayanan pemakaman agar lebih serius melakukan pengawasan terhadap aparat pelaksana di lapangan sehingga terjadinya pungutan yang menyalahi aturan dapat dihapus sama sekali.

Di bidang kesenian dan kebudayaan kebijakan pengembangan yang integratif dan sinerjik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengembangan budaya Betawi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan pariwisata daerah. Pembinaan dan pengembangan seni budaya lain yang berkembang juga perlu mendapatkan perhatian untuk pengkayaan budaya, termasuk penataan museum sebagai tempat proses belajar dan mengajar dan penggalian warisan budaya masa lalu.

Perhatian pemerintah pada masalah olahraga dan pemuda juga masih perlu ditingkatkan. Sarana olahraga untuk masyarakat umum masih sangat tidak memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Dengan mengarahkan kegiatan pemuda pada olahraga akan terbentuk sumber daya pemuda yang sehat, tangguh dan produktif serta mampu menghindarkan penggunaan waktu luang pada kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif dan merugikan masyarakat.

Tugas penanganan masalah sosial tersebut diatas tidak cukup hanya diserahkan pada Pemerintah Daerah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab para pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal. Pembinaan keagamaan perlu makin ditingkatkan agar dapat tercapai keseimbangan dalam kehidupan, termasuk meningkatnya kerukunan hidup beragama.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya adalah memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial dan tawuran masa, serta meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian PMKS, penyalahgunaan narkoba dan tawuran pelajar

3. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan

Program pembangunan sosial dan budaya yang akan dilaksanakan dikelompokkan dalam fungsi sebagai berikut :

a. Keagamaan

1). Program Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) membina mental spiritual dan keagamaan bagi PMKS, (2) melakukan bina potensi keagamaan, serta (3) mengadakan penelitian dan pengembangan kerukunan hidup umat beragama.

2). Program Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan kualitas lembaga keagamaan, (2) melakukan pembinaan lembaga keagamaan semi dan mitra pemerintah, (3) menyelenggarakan bina potensi pertimbangan pembangunan tempat-tempat ibadah, (4) menyusun pola manajemen lembaga keagamaan, serta (5) meningkatkan sarana prasarana kualitas lembaga keagamaan.

a. Kesejahteraan Sosial

1). Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menangani masalah tuna sosial, (2) melakukan pembinaan kesejahteraan anak, remaja, keluarga dan lansia, (3) melakukan penyantunan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, (4) memberikan bantuan subsidi bagi orsos, organisasi profesi, instansi vertikal, korban bencana, musibah sosial, orang terlantar dan perlindungan sosial korban tindak kekerasan, (5) melakukan pelayanan sosial panti-panti sosial, (6) melakukan peningkatan pengembangan sarana dan prasarana (panti sosial dan litbang), serta (7) melakukan penyusunan program, pendataan, evaluasi dan pelaporan.

2). Program Peningkatan Peranserta Sosial Masyarakat

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menyelenggarakan promosi kesos, (2) melakukan pembinaan partisipasi sosial masyarakat, (3) melakukan pembinaan tenaga kesos, (4) melakukan pembinaan lembaga kesos, (5) melestarikan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, (6) mengadakan bina undian dan sumbangan sosial, dan (7) meningkatkan kerjasama lintas sektor dan antar daerah.

3). Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : (1) menata dan mengendalikan TPU yang ada, dan (2) menyediakan dan meningkatkan areal pemakaman yang layak, dan (3) meningkatkan sistem manajemen dan informasi pemakaman.

b. Pemberdayaan Masyarakat

1). Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat antara lain : (1) meningkatkan kepedulian terhadap proses perkembangan dini anak,

(2) meningkatkan pencegahan kecelakaan, serta (3) meningkatkan upaya kesehatan jiwa masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya setempat.

Kegiatan yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan antara lain : (1) memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, (2) meningkatkan upaya mengurangi kemiskinan, (3) menyelenggarakan bimbingan pendidikan luar sekolah/non formal bagi anak jalanan, dan (4) memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan serta gizi bagi masyarakat tidak mampu (5) memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi yang tidak mampu.

2). *Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mewujudkan fungsi kepedulian Dewan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya terhadap kemajuan masyarakat lokal, (2) mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan usaha-usaha rumah tangga di lingkungan kelurahan, dan (3) melibatkan peranan perempuan dalam berbagai aspek kegiatan masyarakat di tingkat kelurahan.

3). *Program Pemberdayaan Perempuan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mengintegrasikan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai kebijakan pembangunan lainnya secara terpadu, (2) melakukan pengkajian kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam rangka mencari alternatif-alternatif kebijakan lebih efektif, (3) melaksanakan promosi, advokasi dan sosialisasi, serta (4) melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah gender sesuai dengan kondisi sosial budaya dan agama serta perkembangan masyarakat DKI Jakarta, termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan hasilnya bagi upaya penguatan dan pengarusutamaan gender.

c. Pelestarian Budaya dan Permuseuman

1). Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan apresiasi masyarakat dalam seni dan budaya, (2) mewujudkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya Betawi dan daerah lainnya, (3) menyusun inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya, dan (4) melaksanakan event-event kesenian dan kebudayaan.

2). Program Pengembangan Museum dan Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya/Sejarah

Kegiatan yang dilakukan melalui program ini antara lain : (1) meningkatkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman, serta (2) mengembangkan kepustakaan dan budaya ilmiah.

3). Program Pengawasan Pemugaran

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menata dan memugar gedung-gedung bersejarah, dan (2) mempromosikan gedung-gedung bersejarah dalam rangka meningkatkan kunjungan.

d. Olahraga dan Kepemudaan

1). Program Peningkatan Peran Kepemudaan dan Pramuka

Kegiatan yang dilakukan untuk pembinaan pemuda dapat dikelompokkan dalam dua bidang: Ekonomi, Agama dan Sosial Budaya.

Di bidang ekonomi, kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mengembangkan kewirausahaan pemuda berorientasi global dengan memperhatikan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, (2) mengembangkan kegiatan kepramukaan di setiap jenjang pendidikan (tingkat dasar hingga menengah), (3) memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi pemuda agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan

menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya bagi pemuda, (4) meningkatkan kualitas kompetensi, kemandirian dan profesionalisme pengusaha kecil, menengah, koperasi pemuda agar lebih kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing global, serta (5) meningkatkan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja pemuda yang diarahkan bagi peningkatan kompetensi, kemandirian dan profesionalisme.

Di bidang agama dan sosial budaya, kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) memperluas kesempatan dalam berorganisasi dan berkreasi bagi pemuda secara bebas dan bertanggung jawab, (2) meningkatkan apresiasi seni dan budaya Betawi dan budaya daerah lainnya di kalangan pemuda sebagai media persahabatan antar daerah dan antar negara, (3) meningkatkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial di kalangan pemuda, (4) mencegah berbagai pengaruh negatif budaya asing di kalangan pemuda dalam rangka memperkuat ketahanan budaya nasional, dan (5) meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada penghargaan terhadap kemajemukan.

Untuk peningkatan peran pramuka, kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mendidik para siswa untuk menjadi kader-kader pembina pramuka, (2) melakukan kegiatan di luar sekolah yang berkaitan dengan kepramukaan.

2). *Program Peningkatan Prestasi Olahraga*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan penyusunan kebijakan-kebijakan dalam upaya peningkatan prestasi olahraga, (2) meningkatkan kualitas dan kuantitas event-event pertandingan berbagai cabang olahraga termasuk atlitnya, (3) meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan membina kelembagaan organisasi olahraga yang ada.

3). *Program Pembinaan Olahraga Masyarakat*

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : (1) meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga, (2) membudayakan olahraga tradisional yang masal, dan (3) melaksanakan event-event hari olahraga.

4. Matriks Indikator Bidang Sosial Budaya

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
Keagamaan	1. Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama	a) Meningkatnya frekuensi pelaksanaan penyuluhan keagamaan b) Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bagi tokoh dan pemuka agama
	2. Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan	a) Meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan keagamaan b) Terlaksananya pemberian subsidi bagi lembaga pendidikan keagamaan
Kesejahteraan Sosial	1. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	a) Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap penduduk usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar b) Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak balita terlantar, anak jalanan dan korban narkoba c) Terselenggaranya bimbingan dan latihan usaha ekonomi produktif bagi PMKS d) Meningkatnya ketersediaan tenaga sukarela pelayanan kesejahteraan sosial e) Terselenggaranya uji coba model standar pelayanan sosial
	2. Peningkatan Peranserta Sosial Masyarakat	a) Meningkatnya jumlah dan kualitas TKSM, Orsos/LSM dan dunia usaha yang berperan aktif dalam memberikan pelayanan sosial termasuk dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba b) Meningkatnya perlindungan pada anak-anak jalanan yang tidak bersekolah c) Meningkatnya sosialisasi tentang bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya di sekolah-sekolah dan masyarakat kelurahan
	3. Peningkatan Pelayanan Pemakaman	a) Meningkatnya fasilitas pemakaman bagi masyarakat b) Meningkatnya subsidi biaya pemakaman bagi masyarakat tidak mampu c) Meningkatnya penyuluhan petugas dan peralatan pemakaman
Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	a) Meningkatnya koordinasi penanganan kemiskinan b) Tersedianya pola dan mekanisme pemberdayaan masyarakat c) Terselenggaranya TNI Manunggal masuk desa/kelurahan
	2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	a) Meningkatnya peranan Dewan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan b) Terpenuhinya prasarana dan sarana kelurahan skala mikro melalui program PPMK c) Meningkatnya usaha-usaha rumahtangga d) Terselenggaranya forum-forum dialogis masyarakat

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a) Menurunnya persentase perempuan yang buta huruf b) Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan c) Meningkatnya jumlah dan proporsi perempuan yang menamatkan sekolah pada setiap jenjang pendidikan d) Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan e) Terbentuknya Pusat Pengendalian Terpadu Pemberdayaan Perempuan Jakarta
Pelestarian Budaya dan Permuseuman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan 2. Pengembangan museum dan pelestarian peninggalan cagar budaya/sejarah 3. Pengawasan Pemugaran 	<ul style="list-style-type: none"> a) Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni budaya Betawi dan seni budaya nusantara b) Meningkatnya kualitas pelatih seni budaya c) Meningkatnya jumlah pagelaran seni budaya d) Meningkatnya promosi seni budaya e) Meningkatnya sarana dan prasarana seni budaya a) Terlaksananya penataan dan penambahan koleksi museum b) Terselenggaranya seminar, pameran dan lomba mengenai museum dan cagar budaya c) Meningkatnya informasi seni budaya, peninggalan sejarah dan permuseuman d) Meningkatnya pemeliharaan museum, cagar budaya dan peninggalan bersejarah a) Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan bersejarah b) Meningkatnya promosi gedung-gedung bersejarah bagi pelajar dan masyarakat
Olah Raga dan Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Peran Kepemudaan dan Pramuka 2. Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Pembinaan Olahraga Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a) Terselenggaranya pelatihan kepemimpinan OSIS b) Terselenggaranya pelatihan kelompok pemuda produktif c) Terselenggaranya kerjasama antar lembaga kepemudaan d) Meningkatnya jumlah keanggotaan pramuka pada siswa tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah e) Meningkatnya efektifitas bantuan Pemda kepada pramuka a) Meningkatnya efektifitas bantuan Pemda kepada KONI Daerah b) Terselenggaranya pemusatan latihan olahragawan c) Meningkatnya jumlah dan kualitas kompetisi seluruh cabang olahraga a) Meningkatnya jumlah penyelenggaraan olahraga massal di masyarakat b) Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah masyarakat setempat c) Meningkatnya jumlah perkumpulan olahraga masyarakat d) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana olahraga e) Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga di kelurahan pemukiman padat penduduk

G. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Permasalahan

Jakarta dengan jumlah penduduk yang besar dan pendapatan masyarakat yang relatif tinggi dibanding masyarakat lainnya di Indonesia, menghadapi dua persoalan besar berkaitan dengan isu SDA dan lingkungan hidup, yaitu (1) relatif berlebihan dalam mengkonsumsi produk yang berasal dari SDA seperti, BBM dan air tanah, (2) pola dan perilaku masyarakat dan dunia bisnis cenderung kurang bersahabat pada lingkungan hidup, sehingga pencemaran Jakarta sudah mencapai ambang yang cukup serius.

Beberapa catatan berikut ini menunjukkan kerisauan sebagian besar masyarakat pada masalah SDA dan lingkungan hidup di Jakarta : (1) terus berlangsungnya peningkatan konsumsi BBM tanpa upaya penghematan serta kesadaran yang rendah pada pemanfaatan energi alternatif, (2) meningkatnya produksi sampah kota dan belum tersedianya pola penanganan yang efektif dan efisien, (3) bahaya banjir tetap mengancam setiap tahun, karena pesatnya pembangunan dan sistem drainase yang kurang baik, (4) Jakarta sangat polutif dan merupakan kota yang memiliki tingkat pencemaran tinggi.

Guna mengatasi masalah diatas, berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan ruang terbuka hijau (taman dan penghijauan), peningkatan kegiatan penerapan kewajiban membuat sumur resapan air hujan, peningkatan kegiatan prokasih, prodasih, dan program laut lestari. Terhadap penanganan sampah, upaya-upaya mengurangi volume pembuangan sampah ke TPA Bantar Gebang, mencari alternatif TPA yang baru serta melaksanakan kerjasama pengolahan sampah dengan pihak swasta/dunia usaha. Upaya pemecahan berbagai permasalahan diatas tidak cukup hanya dibebankan pada Pemerintah Daerah saja, tetapi juga memerlukan perhatian, kesadaran, dan dukungan baik dunia usaha maupun masyarakat luas.

a. Arah Kebijakan

Pembangunan wilayah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang. Arah dan kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengendalian produksi, konsumsi dan aktivitas yang kurang ramah lingkungan.

b. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang merupakan cerminan dari prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka program pembangunan akan dijabarkan ke dalam delapan program. Kedelapan program tersebut saling terkait satu sama lain dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat. Program-program tersebut menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

c. Sumber Daya Alam

1). Program Pengembangan Sumber Daya Pertambangan dan Energi

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) melakukan inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya pertambangan dan energi, (2) melakukan pengawasan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pertambangan dan energi serta menyusun kebijakan dan peraturan baru dalam pengelolaannya, (3) melakukan monitoring dan evaluasi distribusi BBM dan gas serta (4) melakukan upaya-upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya pertambangan dan energi.

2). *Program Pengembangan Sumber Air Tanah*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) melakukan sosialisasi dunia usaha dan masyarakat tentang kerusakan lingkungan akibat penggunaan air tanah yang berlebihan, (2) melakukan monitoring dan evaluasi distribusi BBM dan gas, (3) meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan cadangan sumber air tanah melalui penambahan sumur resapan air hujan.

d. Lingkungan Hidup

1). *Program Peningkatan Kualitas Lingkungan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan program kali bersih, laut lestari, pantai bersih dan udara bersih/langit biru, (2) meningkatkan koordinasi dengan Pemda Jawa Barat dan Pemda Banten dalam menjaga kualitas air sungai, serta (3) meningkatkan sistem penanggulangan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya hayati yang berlebihan.

2). *Program Peningkatan Pengendalian Dampak Lingkungan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pengembangan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, industri dan transportasi, (2) melakukan pertimbangan lingkungan yang lebih bijaksana dalam memberikan ijin lokasi bagi industri, (3) memantau kualitas lingkungan dan meningkatkan kesadaran warga kota akan hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan kepatuhan dunia usaha dan masyarakat terhadap peraturan dan tata nilai masyarakat yang berwawasan lingkungan.

3). *Program Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan kegiatan penataan dan pengembangan penghijauan, (2) meningkatkan pengadaan ruang terbuka hijau, (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas vegetasi dan ruang terbuka hijau, serta (4) meningkatkan pemanfaatan potensi-potensi ruang terbuka.

4). *Program Penyerasian dan Keindahan Lingkungan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan kualitas estetika sarana keindahan kota, (2) menyusun rencana lingkup kegiatan sarana keindahan kota, dan (3) menyusun rencana persebaran, penempatan, dimensi sarana keindahan kota.

b. Kebersihan

1). *Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebersihan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan kota, dan (2) memperkuat aspek legal dalam pengelolaan sampah.

2). *Program Peningkatan Pelayanan Kebersihan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan kebersihan, (2) mengolah sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan, serta (3) meningkatkan penanganan sampah pada sungai, situ, danau dan laut.

4. Matriks Indikator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
Sumber Daya Alam	1. Pengembangan sumber daya pertambangan dan energi	Meningkatnya pelayanan listrik bagi masyarakat di 9 pulau Kepulauan Seribu
	2. Pengembangan sumber air tanah	Terbangunnya 20 sumur resapan percontohan
Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan	a) Terlaksananya pemantauan kualitas udara pada 7 stasiun pemantau udara b) Terlaksananya uji emisi kendaraan c) Terlaksananya pemantauan kualitas air tanah di 80 titik
	2. Peningkatan Pengendalian Dampak Lingkungan	a) Terbentuknya Lembaga Evaluasi Lingkungan Hidup Tingkat Propinsi b) Tersedianya informasi Status Lingkungan Hidup Daerah

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
	3. Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4. Penyerasian dan Keindahan Lingkungan	a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau dan jalur hijau serta ruang interaksi publik b) Meningkatnya keseimbangan lingkungan kehidupan yang lebih sehat, indah dan nyaman c) Terealisasinya refungsionalisasi RTH pada 9 lokasi a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas taman dan keindahan kota b) Tersusunnya rencana keserasian ornamen kota terhadap unsur-unsur kota lainnya. c) Tertatanya penempatan ornamen dan street furniture, termasuk media luar ruang
Kebersihan	1. Peningkatan sarana dan Prasarana Kebersihan 2. Peningkatan Pelayanan Kebersihan	a) Meningkatnya kualitas instalasi pengolahan sampah eksisting b) Tersedianya tempat pengolahan sampah terpadu dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. a) Meningkatnya kesadaran dan peranserta masyarakat terhadap kebersihan kota b) Meningkatnya kebersihan kota c) Meningkatnya kinerja aparat kebersihan

H. Bidang Sarana dan Prasarana Kota

1. Permasalahan

Persoalan menonjol yang memerlukan perhatian serius berkaitan dengan prasarana dan sarana publik adalah: (1) belum berhasilnya penanganan permukiman kumuh melalui resettlement, (2) bencana banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi langganan banjir, (3) belum tertanganinya masalah sampah dengan teknologi modern, (4) belum memadainya fasilitas jalan, trotoar, (5) masih buruknya sistem transportasi umum, (6) belum optimalnya penataan ruang dan peruntukan penggunaan lahan, (7) masih buruknya prasarana dan sarana pelayanan publik, dan (8) belum optimalnya penerangan jalan umum terutama dipinggiran kota.

Di dalam upaya meningkatkan utilitas kota, Pemda DKI Jakarta mengupayakan segera dilaksanakannyapembangunan sarana utilitas bawah tanah,

untuk menghindari terjadinya kegiatan bongkar pasang jalan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat serta merupakan pemborosan.

Mengatasi permasalahan banjir, disamping terus mengupayakan pembangunan sistem makro penanganan banjir dan mengoptimalkan kinerja sistem pengendali banjir yang ada, upaya mengatasi banjir pada daerah-daerah langganan banjir tetap menjadi perhatian utama. Disisi lain kualitas air sungai juga perlu tetap dijaga dan ditingkatkan dan menjadi prioritas penanganan khususnya dalam rangka tersedianya air baku yang baik.

Permasalahan transportasi yang dihadapi di Jakarta adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum. Disamping itu dengan telah ditetapkannya Kepulauan Seribu sebagai Kabupaten Administrasi maka tingkat pelayanan angkutan penumpang dan barang perlu dikembangkan. Untuk memelihara kinerja sistem angkutan yang ada agar tetap berfungsi secara optimal, maka selain pembangunan infrastruktur baru, diperlukan peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan yang ada, perbaikan manajemen lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan umum. Upaya-upaya kearah pembangunan sistem angkutan umum masal (MRT) perlu terus diupayakan dengan koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan mencari langsung investor, walaupun tidak dapat direalisasikan dalam jangka pendek, untuk itu perlu dikembangkan solusi interim melalui penerapan sistem *busway*.

Dalam hal penanganan dan pembangunan permukiman dan perumahan, diupayakan tetap memprioritaskan pada pemukiman padat dan kumuh untuk dibangun Rumah Susun Sederhana (RSS), mengingat lahan yang tersedia. Selain itu juga tetap diupayakan pembangunan MHT-III, perbaikan lingkungan dan jalan, serta penyediaan air bersih.

Di samping penyediaan prasarana dan sarana pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, kesadaran masyarakat dan tanggung jawab publik juga dituntut untuk ikut memelihara prasarana dan sarana yang ada. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat memiliki perilaku merusak perlu mendapat

perhatian dalam rangka penegakan hukum. Kasus-kasus seperti pengrusakan telepon umum, taman kota, pagar pembatas jalan dan corat-coret dinding mudah dijumpai dimana-mana. Dengan kata lain, pemanfaatan fasilitas publik belum optimal karena masyarakat belum memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*) yang cukup.

2. Arah Kebijakan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan kota yang semakin pesat, perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana kota guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat serta pemerintah yang ada didalamnya. Berbagai upaya pembangunan untuk bidang sarana dan prasarana kota tersebut dituangkan dalam arah dan kebijakan pemerintah daerah yaitu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan daya dukung kota.

3. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan

Dengan memperhatikan fungsi, arah dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kota DKI Jakarta, maka program pembangunan akan dijabarkan kedalam delapan belas program. Delapan belas program tersebut meliputi lima program pada fungsi kelengkapan kota, dua program pada fungsi tata air, tiga program pada fungsi perhubungan, tiga program pada fungsi perumahan dan permukiman, dan lima program pada fungsi tata ruang dan tata bangunan.

Kedelapan belas program tersebut saling terkait satu sama lain dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota DKI Jakarta dalam mendukung terciptanya kota Jakarta yang indah dan sehat dengan lingkungan permukiman yang baik. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kelengkapan Kota

1). Program Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan penataan utilitas, dan (2) mengendalikan jaringan utilitas bawah tanah.

2). *Program Penerangan Jalan dan Tempat Umum*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : meningkatkan kuantitas dan kualitas PJU.

3). *Program Pengembangan Pelayanan Air Limbah*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) membangun jaringan pembuangan air limbah, dan (2) melakukan monitoring terhadap pembuangan air limbah.

4). *Program Pengembangan Pelayanan Air Bersih*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan jumlah pelanggan air bersih melalui perluasan jaringan distribusi, (2) mengadakan sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat agar pemanfaatan air tanah tidak berlebihan, (3) meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih, (4) meningkatkan mutu dan standar air bersih yang disalurkan kepada masyarakat dan dunia usaha, dan (5) melakukan monitoring pipa yang sudah tidak memenuhi syarat guna memperkecil tingkat kebocoran air bersih ke pelanggan.

b. Tata Air

1). *Program Pengendalian Banjir*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) membangun secara bertahap Banjir Kanal Timur, (2) membangun jalan inspeksi dalam upaya penertiban bantaran kali, (3) menerapkan sistem "Peil Constant" dalam pemeliharaan sungai, waduk dan saluran, (4) melakukan pemeliharaan kali, situ, waduk, saluran dengan melibatkan pihak swasta, (5) menentukan debit air rencana untuk saluran makro, serta (5) memprioritaskan penanganan di daerah langganan banjir.

2). *Program Peningkatan Drainase Kota*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) melakukan evaluasi pada sistem drainase yang ada, (2) melakukan analisis dalam menentukan curah hujan rencana, (3) membangun subsistem drainase, (4) membangun dan

memelihara kawasan resapan air tanah, dan (5) membangun saluran khusus air limbah.

c. Perhubungan

1). *Program Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan kapasitas ruas-ruas jalan tertentu melalui pelebaran jalan pada kawasan volume lalu lintas padat (Tipar Cakung, Pondok Bambu dan Penggilingan serta jalan lingkungan di Kelurahan Jatinegara, Pondok Bambu dan Duren Sawit), (2) meningkatkan kapasitas persilangan utama melalui pembangunan *fly-over dan under-pass* secara bertahap, (3) membangun dan meningkatkan kapasitas jalan terobosan (alternatif) untuk mengurangi kemacetan secara bertahap, serta (4) memelihara dan meningkatkan kualitas jaringan jalan yang ada sehingga dapat berfungsi secara optimum.

2). *Program Pengembangan Sarana dan Fasilitas Perhubungan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menerapkan langkah-langkah *traffic management* termasuk langkah pembatasan lalu lintas (*traffic restraint*) pada ruas jalan arteri dan kawasan padat lalu lintas, (2) meningkatkan sarana pengaturan lalu lintas (rambu, marka) dan angkutan jalan, (3) menjalankan penegakan hukum dan sanksi kepada pelanggaran lalu lintas, (4) meningkatkan sarana dan prasarana angkutan laut, serta (5) meningkatkan sarana pengaturan dan pengendalian penggunaan frekuensi dan fasilitas telekomunikasi.

3). *Program Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) melaksanakan penataan rute pelayanan angkutan dan terminal penumpang (pembangunan bertahap terminal pengganti Pulo Gadung) serta menerapkan sistem pelayanan angkutan yang lebih berkualitas, (2) membangun prasarana angkutan umum yang bersifat *mass transportation* seperti *bus way*, (3) meningkatkan disiplin para pengemudi kendaraan umum melalui penerapan dan penegakan aturan

berlalu lintas secara tegas, serta (4) melakukan finalisasi Raperda Penyelenggaraan Angkutan Umum dan Pengaturan Kelembagaannya (termasuk peran dewan transportasi kota).

d. Perumahan dan Permukiman

1). Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan pembangunan rumah susun untuk rakyat kecil, dan (2) memberikan kemudahan bagi swasta dalam penyediaan rumah susun sewa sederhana.

2). Program Penataan Lingkungan Permukiman

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan pembangunan RSS untuk menyelesaikan kawasan kumuh, (2) melanjutkan program pembangunan MHT-III, serta (3) melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya rumah sederhana dan sehat.

3). Program Peningkatan Pelayanan Perumahan dan Permukiman

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan penghuni rumah susun dalam kegiatan sosial dan ekonomi, dan (2) meningkatkan kualitas dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman.

e. Tata Ruang

1). Program Perencanaan Ruang

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menyusun rencana tata ruang yang efisien, adil dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, (2) menyediakan pelayanan informasi tata ruang pada masyarakat, (3) melakukan koordinasi dan konsultasi antar pemerintah dengan lembaga dan organisasi masyarakat, termasuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang kota, (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, (5) mengembangkan peraturan perundang-undangan daerah bidang tata ruang, serta (6) menyusun kebijakan tata guna tanah.

2). *Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, (2) menyusun dan memantapkan instrumen pendukung implementasi rencana tata ruang, (3) meningkatkan penegakan hukum, (4) menyelesaikan hambatan pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana, (5) menyiapkan kebijaksanaan tentang penguasaan perencanaan di bidang sarana dan prasarana, serta (6) menyiapkan kebijaksanaan dalam rangka kerjasama dengan pihak III di bidang sarana dan prasarana.

3). *Program Penataan dan Pengawasan Bangunan*

Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menyusun peraturan teknis bangunan, (2) meningkatkan pelayanan di bidang perizinan bangunan, dan kelayakan, (3) meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan, (4) melaksanakan kelayakan dan penertiban pemugaran bangunan dan lingkungan cagar budaya, (5) meningkatkan pengarahannya/penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku pembangunan terhadap ketentuan peraturan bangunan, serta (6) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku pembangunan melalui penertiban atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan bangunan yang berlaku.

4) *Program Pengembangan Kawasan Khusus/Strategis*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) melaksanakan perencanaan tata ruang dengan pendekatan kawasan, (2) mengembangkan serta memberikan kemudahan berusaha pada kawasan khusus, (3) mengadakan inventarisasi sarana dan prasarana publik yang sudah ada, (4) menyediakan sarana dan prasarana publik yang disesuaikan dengan pengembangan kawasan, (5) mewujudkan koordinasi antar instansi dalam perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana publik, (6) melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap penyalahgunaan tata ruang dan pelestarian lingkungan (7) mengembangkan kawasan dan bangunan cagar budaya/sejarah.

f. Tata Bangunan

1). *Program Penataan Bangunan Gedung Pemda*

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) menyusun peraturan dan standardisasi gedung Pemda Propinsi DKI Jakarta dan lingkungan serta fasilitasnya, (2) menyusun penataan gedung Pemda Propinsi DKI Jakarta dan lingkungan serta fasilitasnya, (3) membangun gedung Pemda Propinsi DKI Jakarta dan lingkungan serta fasilitasnya, (4) melaksanakan bimbingan teknis perencanaan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemda, (5) menyusun harga satuan bahan bangunan dan upah, bangunan jadi, bahan bangunan non standard.

4. Matriks Indikator Bidang Sarana dan Prasarana Kota

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
Kelengkapan Kota	1. Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas 2. Penerangan Jalan dan Tempat Umum 3. Pengembangan Pengelolaan Air Limbah 4. Pengembangan Pelayanan Air Bersih	a) Tersedianya rencana penataan jaringan utilitas telekomunikasi, listrik, gas, air bersih serta air limbah b) Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan utilitas kota. Bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan, tempat umum terutama di daerah pinggiran kota a) Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah di 2 (dua) pasar tradisional b) Terbangunnya sistem penanganan air limbah di Kompleks Dinas Teknis Jati Baru Terbangunnya instalasi pengolahan air bersih di 4 (empat) lokasi MCK
Tata Air	1. Pengendalian Banjir 2. Peningkatan Drainase Kota	a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pengendalian banjir: saluran/kali, waduk/situ, pompa air dan pintu air b) Meningkatnya kapasitas aliran saluran/kali dan penampungan waduk/situ c) Terlaksananya pembebasan sebagian lahan untuk Banjir Kanal Timur a) Meningkatnya kuantitas sarana drainase kota b) Meningkatnya kapasitas aliran saluran penghubung dan saluran mikro/permukiman
Perhubungan		

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
	1. Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan 2. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Perhubungan 3. Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum	a) Meningkatnya kapasitas 21 ruas jalan arteri dan kolektor pada kawasan pemukiman dan perdagangan b) Meningkatnya kapasitas simpang pada 5 (lima) persimpangan utama c) Meningkatnya kualitas jaringan jalan yang ada khususnya pada wilayah permukiman d) Bertambahnya fasilitas pejalan kaki a) Menurunnya tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas b) Bertambahnya sarana pengaturan lalu lintas c) Meningkatnya kualitas sarana dan fasilitas angkutan jalan dan penyeberangan d) Tersedianya sarana dan fasilitas busway jalur Blok M - Kota e) Terlaksananya pemagaran, pematangan tanah dan persiapan pembangunan terminal antar kota di wilayah Timur, Barat dan Selatan f) Terkendalinya penggunaan frekuensi radio dan tertatanya jaringan pos secara baik a) Meningkatnya frekuensi pengawasan angkutan penumpang dan barang b) Terlaksananya pengoperasian sistem busway c) Meningkatnya disiplin awak angkutan umum dan masyarakat pengguna jasa angkutan umum d) Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang dan barang dari dan ke Kepulauan Seribu e) Tersusunnya jaringan pelayanan angkutan umum dan strategi penerapannya f) Terbentuknya Lembaga Transportasi Kota
Perumahan dan Permukiman	1. Pengembangan Perumahan 2. Pengembangan Lingkungan Permukiman 3. Pelayanan Perumahan dan Permukiman	a) Meningkatnya penyediaan rusun bagi penghuni permukiman kumuh dan bantaran kali b) Meningkatnya penyediaan rusun bagi masyarakat miskin dan buruh c) Terlaksananya penataan pembangunan perumahan sesuai RTRW a) Terlaksananya perbaikan lingkungan permukiman b) Meningkatnya pengawasan pengembangan lingkungan permukiman a) Meningkatnya jumlah fasilitas permukiman yang layak b) Meningkatnya pelayanan dalam urusan perumahan
Tata Ruang	1. Perencanaan Ruang 2. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a) Terlaksananya updating Lembar Rencana Kota (LRK) secara bertahap b) Tersedianya basis data dan aplikasi ketatakotaan c) Terlaksananya pelatihan bagi fasilitator forum peranserta masyarakat d) Terlaksananya komputerisasi dan upgrading data dasar untuk operasional pelayanan a) Terlaksananya sertifikasi ISO 9001 : 2000 untuk 2 kecamatan b) Terlaksananya penerapan GIS aset Pemda

Fungsi	Program	Indikator Kinerja
	3. Penataan dan Pengawasan Bangunan 4. Pengembangan Kawasan Khusus/Strategis	a) Terlaksananya penyempurnaan ketentuan teknis membangun b) Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kegiatan membangun c) Terselenggaranya kelayakan dan penertiban pemugaran bangunan dan lingkungan cagar budaya d) Terselenggaranya penertiban terpadu a) Tersusunnya rencana pengintegrasian tata ruang kawasan pelabuhan Jakarta dengan kawasan sekitar b) Terlaksananya identifikasi lokasi-lokasi potensial sebagai RTH pada kawasan pemukiman padat kumuh c) Tersusunnya panduan rancang kota untuk beberapa lokasi strategis
Tata Bangunan	1. Penataan bangunan dan gedung Pemda	a) Terselenggaranya bimbingan teknis perencanaan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemda b) Tersusunnya rencana arsitektur lingkungan di 3 (tiga) paket c) Tersusunnya rencana bangunan gedung di 3 (tiga) lokasi d) Terlaksananya pengembangan gedung Balaikota e) Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis f) Lanjutan Pembangunan Gedung Samsat/ Penda Jakarta Utara g) terselesaikannya pembangunan Gedung Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya h) Terselesaikannya pembangunan Masjid Islamic Center i) Lanjutan pembangunan Gedung Walikotamadya di 5 (lima) wilayah j) Lanjutan pembangunan gedung Dinas Teknis Kepulauan Seribu